

LAMPIRAN PENELITIAN

1. Lampiran Biodata mahasiswa
2. Pedoman wawancara
3. Lampiran Karakteristik Responden
4. Lampiran Olah Data Penelitian
5. Lampiran Proposal Penelitian
6. Lampiran Dokumen Penelitian



Lampiran 1. Biodata Mahasiswa

BIODATA MAHASISWA



Nama : SUNAR
NIM : 20190210011
Program studi : Administrasi Publik
Fakultas : Sosial, Ekonomi dan Humaniora
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Juli 1969
Agama : Islam
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Karangcegak
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Dosen Pembimbing Skripsi 1 : Shadu Satwika Wijaya, S.Sos.,M.Si.
Dosen Pembimbing Skripsi 2 : Chamid Sutikno, S, IP., M.Si.
Dosen Penguji : Indah Ayu Permana Pribadi, S.IP., M.Sos.
Email : sunar.unupwt@gmail.com
Nomor Handphone : 085601788020
Alamat : Kedungmalang RT.01 RW.02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Purwokerto, Agustus 2024

S U N A R

NIM. 20190210011

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KARANGCEGAK KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

I. Birokrasi:

1. Bagaimana keberadaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di TPST Karangcegak?
2. Dapatkah Anda menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Desa, DLH, dan KSM Mekar Sari dalam pengelolaan sampah?
3. Bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
4. Sejauh mana struktur organisasi dapat fleksibel dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang muncul?

II. Komunikasi:

5. Bagaimana proses distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa dilakukan?
6. Seberapa jelas informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat?
7. Apakah ada konsistensi dalam pesan kebijakan yang disampaikan kepada berbagai pihak? Jika ada perbedaan, mengapa?
8. Bagaimana efektivitas sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Karangcegak? Metode apa yang digunakan?

III. Sumber Daya:

9. Apakah jumlah staf pengelola TPST Karangcegak sudah mencukupi? Jika belum, apa kendalanya?
10. Bagaimana kompetensi dan keahlian staf dalam pengelolaan sampah? Apakah ada program pelatihan khusus?
11. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk operasional TPST? Apakah mencukupi untuk kebutuhan saat ini?
12. Sejauh mana kelengkapan fasilitas dan peralatan di TPST, seperti alat pemilah sampah dan kendaraan pengangkut?

IV. Disposisi:

13. Sejauh mana pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah? Adakah kesulitan dalam memahami kebijakan tersebut?
14. Bagaimana komitmen dan dedikasi pengelola TPST dalam menjalankan tugas mereka?
15. Bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah? Apakah ada resistensi atau dukungan?
16. Apakah ada sistem insentif bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif? Jika ada, bagaimana bentuknya?



Lampiran 3. Karakteristik Informan

No.	Nama	Inisial	Umur	Jabatan
1	Sidik	SD	47	Ketua KSM TPST Karangcegak
2	Agus Subejo	AS	50	Kepala Desa Karangcegak
3	Warsiti	WR	45	Pemilah Sampah
4	Purwanti	PW	29	Masyarakat Pelanggan KSM
5	Amelia	AM	35	Masyarakat Bukan Pelanggan KSM



Lampiran 4. Olah Data Penelitian

a. Kutipan Hasil Wawancara

Item	Hasil Wawancara	
1.	Aspek : Birokrasi	
	Sub Aspek : Keberadaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di TPST Karangcegak	
	Pertanyaan : Bagaimana keberadaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di TPST Karangcegak?	
	SD	"TPST Karangcegak memiliki SOP yang jelas untuk pengelolaan sampah. Kami telah menyusun SOP secara rinci, mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan, pengolahan, hingga pemasaran hasil olahan. SOP ini kami susun berdasarkan panduan dari Dinas Lingkungan Hidup dan hasil studi banding ke beberapa tempat pengolahan sampah di kota lain. Kami selalu berusaha mensosialisasikan dan menerapkan SOP ini kepada seluruh petugas TPST."
	AS	"Sepengetahuan saya, TPST Karangcegak memiliki SOP yang cukup jelas. Pihak KSM Mekarsari telah menyampaikan dokumen SOP kepada pihak desa. Kami juga turut memantau penerapannya di lapangan. SOP ini penting untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan."
	WR	"Ya, kami di sini punya SOP yang jelas untuk kerja sehari-hari. Waktu pertama kali masuk kerja, saya diajari cara memilah sampah yang benar sesuai prosedur. Ada petunjuknya di dinding hanggar, jadi kami bisa selalu ingat urutan kerjanya. Misalnya, kami harus pakai sarung tangan dan masker dulu sebelum mulai memilah. Terus ada cara khusus memisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau ada yang bingung, kami bisa tanya ke mandor yang selalu mengawasi. Jadi menurut saya SOPnya cukup jelas dan membantu kami bekerja dengan teratur."
	PW	"Saya tidak tahu detailnya, tapi saya melihat petugas TPST bekerja dengan teratur. Mereka selalu datang tepat waktu untuk mengambil sampah, dan saya lihat ada prosedur tertentu yang mereka ikuti saat memilah sampah. Jadi saya rasa mereka punya SOP yang jelas, meskipun saya sebagai warga tidak pernah melihat dokumennya secara langsung."
AM	"Maaf, saya kurang tahu tentang SOP di TPST Karangcegak. Karena saya belum menjadi pelanggan, jadi saya tidak pernah mendapat informasi detail tentang prosedur pengelolaan sampah mereka. Tapi saya pernah dengar dari tetangga yang jadi pelanggan bahwa TPST bekerja cukup teratur."	
Kesimpulan item nomor 1.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, TPST Karangcegak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan sampah. Keberadaan SOP ini dikonfirmasi oleh Ketua KSM Mekarsari, Kepala Desa, dan pekerja pemilah sampah. SOP tersebut dinilai cukup rinci, mencakup berbagai tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga pemasaran hasil olahan. Dalam praktiknya, SOP ini diterapkan dalam operasional sehari-hari TPST, dengan adanya petunjuk visual di tempat kerja dan pengawasan dari mandor untuk memastikan kepatuhan. Meskipun demikian, sosialisasi SOP kepada masyarakat umum tampaknya masih terbatas. Pelanggan KSM mengamati bahwa petugas TPST bekerja dengan teratur, yang mengindikasikan adanya prosedur yang jelas,	

	namun mereka tidak mengetahui detail SOP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah ada dan diterapkan dengan baik di internal TPST, masih ada ruang untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.	
Item	Hasil Wawancara	
2.	Aspek	: Birokrasi
	Sub Aspek	: Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi terkait (Pemerintah Desa, Pengelola TPST, KSM Mekar Sari)
	Pertanyaan	: Dapatkah Anda menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Desa, DLH, dan KSM Mekar Sari dalam pengelolaan sampah?
	SD	<i>"Pembagian tugas cukup jelas. Kami di KSM Mekar Sari bertanggung jawab atas operasional harian TPST, mulai dari pengumpulan sampah dari warga, pemilahan, pengolahan, hingga pemasaran hasil olahan. Pemerintah Desa memberikan dukungan administratif dan fasilitasi hubungan dengan masyarakat. Sementara DLH memberikan panduan teknis, monitoring, dan evaluasi secara berkala. DLH juga membantu kami dalam hal pengadaan alat-alat berat dan pemeliharaan mesin-mesin besar."</i>
	HY	<i>"Peran kami di Pemerintah Desa adalah sebagai fasilitator. Kami menyediakan lahan untuk TPST, membantu sosialisasi program ke masyarakat, dan mengeluarkan SK untuk kepengurusan KSM. Kami juga membantu koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten jika diperlukan. KSM Mekar Sari bertanggung jawab penuh atas operasional TPST, sementara DLH memberikan arahan teknis dan memastikan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi yang berlaku."</i>
	WR	<i>"Saya sebagai pekerja di sini tugasnya ya memilah sampah sesuai jenisnya. KSM yang mengatur jadwal kerja dan gaji kami. Kalau ada masalah teknis, biasanya KSM yang menghubungi DLH. Pemerintah Desa kadang datang untuk melihat-lihat kegiatan di sini, tapi tidak terlibat langsung dalam pekerjaan sehari-hari kami."</i>
	PW	<i>"Setahu saya, KSM yang mengurus pengambilan sampah dari rumah-rumah warga. Kalau ada keluhan atau usulan, kami biasanya sampaikan ke RT/RW, nanti diteruskan ke desa. Pernah juga ada sosialisasi dari desa tentang pentingnya memilah sampah. Kalau DLH, saya pernah lihat mereka datang untuk mengecek TPST, tapi tidak tahu detailnya apa saja yang mereka kerjakan."</i>
	AM	<i>"Saya kurang tahu persis pembagian tugasnya, karena belum jadi pelanggan. Tapi dari yang saya dengar, KSM yang mengelola sampah sehari-hari. Desa sepertinya yang mengurus izin-izin dan sosialisasi ke warga. Kalau DLH, mungkin yang membuat aturan-aturan tentang pengelolaan sampah ya? Tapi saya tidak yakin detailnya."</i>
Kesimpulan item nomor 2	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas antara Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan KSM Mekar Sari dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak. KSM Mekar Sari berperan sebagai pelaksana utama, bertanggung jawab atas operasional harian TPST, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemasaran hasil olahan sampah. Pemerintah Desa berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan lahan untuk TPST, membantu sosialisasi program ke masyarakat, mengeluarkan SK kepengurusan KSM, dan menjembatani koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, DLH berperan dalam memberikan panduan teknis, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta membantu dalam pengadaan dan pemeliharaan alat-alat berat. DLH juga bertanggung jawab memastikan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun pembagian tugas ini cukup	

	dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, pemahaman masyarakat umum, terutama yang belum menjadi pelanggan KSM, masih terbatas mengenai detail peran masing-masing instansi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang struktur dan pembagian tanggung jawab dalam sistem pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.
Item	Hasil Wawancara
3.	Aspek : Birokrasi
	Sub Aspek : Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah
	Pertanyaan : Bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
SD	<i>Koordinasi antar lembaga cukup intens. Kami rutin mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan pihak desa dan perwakilan DLH. Selain itu, ada grup WhatsApp untuk komunikasi cepat jika ada masalah mendadak. Kami juga menyampaikan laporan bulanan ke desa dan DLH. Kalau ada kebijakan baru dari kabupaten, biasanya DLH yang mensosialisasikan ke kami melalui pertemuan khusus atau surat edaran.</i>
HY	<i>"Koordinasi berjalan cukup baik. Kami memfasilitasi pertemuan rutin antara KSM, tokoh masyarakat, dan perwakilan DLH setiap tiga bulan sekali. Selain itu, kami selalu mengundang KSM dan DLH dalam musyawarah desa terkait pengelolaan sampah. Jika ada masalah atau keluhan dari warga, kami segera meneruskan ke KSM atau DLH sesuai dengan kewenangannya."</i>
WR	<i>"Saya tidak terlalu tahu soal koordinasi antar lembaga. Tapi saya lihat kadang ada rapat-rapat di kantor TPST yang dihadiri orang-orang dari desa dan DLH. Ketua KSM juga sering memberitahu kami kalau ada arahan baru dari desa atau DLH tentang cara kerja atau aturan baru."</i>
PW	<i>"Saya pernah diundang dalam pertemuan warga yang membahas pengelolaan sampah. Di sana hadir perwakilan dari desa, KSM, dan DLH. Mereka menjelaskan program-program yang sedang berjalan dan rencana ke depan. Kalau ada pengumuman penting, biasanya disampaikan melalui RT/RW atau lewat selebaran."</i>
AM	<i>"Saya kurang tahu detailnya, tapi pernah lihat ada spanduk tentang program pengelolaan sampah yang logonya ada KSM, desa, dan DLH. Mungkin itu bentuk koordinasi mereka ya? Tapi saya belum pernah ikut pertemuan khusus tentang hal ini."</i>
Kesimpulan item nomor 3	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak berjalan cukup baik dan terstruktur. Terdapat mekanisme koordinasi formal berupa rapat rutin bulanan antara KSM Mekarsari, Pemerintah Desa, dan perwakilan DLH, serta pertemuan triwulanan yang juga melibatkan tokoh masyarakat. Selain itu, ada pula saluran komunikasi informal melalui grup WhatsApp untuk penanganan masalah yang bersifat mendesak. KSM Mekarsari secara rutin menyampaikan laporan bulanan kepada Pemerintah Desa dan DLH, memastikan aliran informasi yang konsisten. Pemerintah Desa berperan aktif sebagai fasilitator, menyelenggarakan forum-forum diskusi dan menjembatani komunikasi antara KSM, masyarakat, dan instansi terkait. DLH berperan dalam mensosialisasikan kebijakan baru dari tingkat kabupaten. Meskipun koordinasi di tingkat pengambil kebijakan terlihat berjalan dengan baik, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses koordinasi ini masih bervariasi. Pelanggan KSM cenderung lebih mengetahui tentang adanya forum-forum koordinasi dibandingkan dengan non-pelanggan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.

Item	Hasil Wawancara	
4.	Aspek : Birokrasi	
	Sub Aspek : Fleksibilitas struktur organisasi dalam menangani masalah pengelolaan sampah	
	Pertanyaan : Sejauh mana struktur organisasi dapat fleksibel dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang muncul?	
	SD	<i>"Struktur organisasi kami cukup fleksibel. Meski ada pembagian tugas yang jelas, kami bisa cepat beradaptasi jika ada masalah mendadak. Misalnya, saat ada kerusakan mesin, kami bisa langsung membentuk tim khusus untuk menanganinya. Kami juga rutin melakukan rotasi tugas untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menangani berbagai situasi."</i>
	HY	<i>"Dari pengamatan kami, KSM Mekar Sari cukup responsif terhadap perubahan. Mereka bisa dengan cepat menyesuaikan struktur kerja saat ada lonjakan sampah atau saat musim hujan. Pemerintah desa sendiri selalu siap membantu jika diperlukan mengatasi masalah yang muncul."</i>
	WR	<i>"Di sini kerjanya tidak kaku. Kalau ada masalah, biasanya langsung diatasi bersama-sama. Pernah waktu musim panen, sampah organik melonjak, kami yang biasanya di bagian pemilahan plastik ikut membantu di bagian kompos."</i>
	PW	<i>"Menurut saya cukup fleksibel. Pernah suatu kali truk pengangkut sampah rusak, tapi mereka cepat mencari solusi dengan meminjam kendaraan dari desa. Pelayanan ke warga tetap lancar. Itu menunjukkan mereka bisa mengatasi masalah dengan cepat."</i>
	AM	<i>"Saya kurang tahu detailnya, tapi dari yang saya dengar dari tetangga, sepertinya pengelolaan sampah di sini cukup teratur. Mungkin itu karena mereka punya cara kerja yang bisa menyesuaikan dengan keadaan."</i>
Kesimpulan item nomor 4	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, struktur organisasi dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak menunjukkan tingkat fleksibilitas yang cukup baik. KSM Mekar Sari mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai tantangan dan perubahan situasi, seperti kerusakan mesin, lonjakan volume sampah, atau kondisi cuaca ekstrem. Fleksibilitas ini terlihat dari kemampuan mereka untuk membentuk tim khusus, melakukan rotasi tugas, dan menyesuaikan alokasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Pemerintah desa juga berperan dalam mendukung fleksibilitas ini dengan kesiapan memberikan bantuan tambahan bila diperlukan.	

Item	Hasil Wawancara	
5.	Aspek : Komunikasi	
	Sub Aspek : Distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa	
	Pertanyaan : Bagaimana proses distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa dilakukan?	
	SD	<i>"Distribusi kebijakan biasanya melalui beberapa tahap. Pertama, ada sosialisasi dari DLH Kabupaten ke perwakilan desa dan KSM. Kemudian, kami mendapat surat edaran resmi yang menjelaskan detail kebijakan. Setelah itu, biasanya ada pertemuan koordinasi di tingkat kecamatan untuk membahas implementasinya. Kami di KSM juga sering diundang dalam rapat-rapat di tingkat kabupaten untuk memahami langsung kebijakan baru."</i>
	HY	<i>"Proses distribusi kebijakan cukup terstruktur. Kami menerima informasi melalui surat resmi dan undangan sosialisasi dari kabupaten. Setelah itu, kami mengadakan musyawarah desa untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan implementasi kebijakan tersebut dengan perangkat desa, KSM, dan perwakilan masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan kecamatan untuk memastikan keselarasan implementasi."</i>
	WR	<i>"Saya tidak terlalu paham proses di tingkat atas, tapi biasanya kalau ada kebijakan baru, kami dikumpulkan oleh pengurus KSM untuk diberi penjelasan. Kadang juga ada petugas dari kabupaten yang datang memberi arahan langsung ke kami para pekerja."</i>
	PW	<i>"Setahu saya, kalau ada kebijakan baru biasanya disampaikan melalui pertemuan warga atau selebaran yang dibagikan ke rumah-rumah. Kadang juga ada pengumuman di balai desa atau masjid. Tapi untuk proses detailnya dari kabupaten ke desa, saya kurang tahu."</i>
AM	<i>"Saya jarang mendapat informasi langsung tentang kebijakan pengelolaan sampah. Tapi pernah lihat ada spanduk di jalan yang menginformasikan program baru dari kabupaten. Mungkin itu salah satu cara menyampaikan kebijakan ke masyarakat ya."</i>	
Kesimpulan item nomor 5	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, proses distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa dilakukan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur. Dimulai dengan sosialisasi dari DLH Kabupaten kepada perwakilan desa dan KSM, dilanjutkan dengan penyampaian surat edaran resmi yang menjelaskan detail kebijakan. Selanjutnya, diadakan pertemuan koordinasi di tingkat kecamatan untuk membahas implementasi. Pemerintah Desa berperan penting dalam menjembatani distribusi kebijakan ini dengan mengadakan musyawarah desa untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan implementasi kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan. KSM juga dilibatkan dalam proses ini melalui undangan ke rapat-rapat di tingkat kabupaten. Meskipun proses distribusi di tingkat pengambil kebijakan terlihat jelas, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini masih bervariasi. Pekerja di lapangan dan masyarakat umum cenderung menerima informasi melalui sosialisasi langsung, selebaran, atau pengumuman publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendistribusikan kebijakan secara menyeluruh, masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum terlibat langsung dalam program pengelolaan sampah.	

Item	Hasil Wawancara	
6.	Aspek : Komunikasi	
	Sub Aspek : Kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah kepada pelaksana dan masyarakat	
	Pertanyaan : Seberapa jelas informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat?	
	SD	<i>"Kami berusaha menyampaikan informasi sedetail mungkin kepada pelaksana dan masyarakat. Untuk pelaksana, kami adakan briefing rutin dan pelatihan khusus. Untuk masyarakat, kami buat brosur, spanduk, dan sosialisasi door-to-door. Namun, terkadang ada istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam, jadi kami harus sering menjelaskan ulang."</i>
	HY	<i>"Informasi kebijakan kami sampaikan melalui berbagai media. Ada pertemuan rutin di tingkat RT/RW, pengumuman di balai desa, dan juga melalui media sosial desa. Kami juga membuat infografis sederhana agar mudah dipahami. Namun, tantangannya adalah memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang aktif dalam kegiatan desa."</i>
	WR	<i>"Bagi kami para pekerja, informasinya cukup jelas. Ada panduan tertulis dan pelatihan rutin. Kalau ada yang kurang paham, bisa langsung tanya ke pengawas. Tapi kadang ada perubahan kebijakan yang disampaikan mendadak, jadi butuh waktu untuk menyesuaikan."</i>
	PW	<i>"Informasi yang kami terima cukup jelas, terutama tentang jadwal pengambilan sampah dan cara pemilahan. Ada brosur yang dibagikan dan nomor kontak yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan. Tapi untuk kebijakan yang lebih rumit, kadang masih butuh penjelasan lebih lanjut."</i>
AM	<i>"Sejujurnya, saya merasa informasi yang sampai ke saya kurang jelas. Saya tahu ada program pengelolaan sampah, tapi detailnya tidak paham. Mungkin karena saya belum jadi pelanggan, jadi kurang dapat informasi lengkap. Akan lebih baik jika ada sosialisasi yang menjangkau semua warga, bukan hanya pelanggan."</i>	
Kesimpulan item nomor 6	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat bervariasi. Untuk pelaksana dan pekerja di TPST, informasi cenderung disampaikan dengan jelas melalui briefing rutin, pelatihan khusus, dan panduan tertulis. Namun, untuk masyarakat umum, tingkat kejelasan informasi lebih beragam. KSM dan Pemerintah Desa telah melakukan upaya penyampaian informasi melalui berbagai media seperti brosur, spanduk, sosialisasi door-to-door, pertemuan RT/RW, dan media sosial. Meski demikian, masih ada tantangan dalam memastikan informasi sampai dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum menjadi pelanggan KSM atau kurang aktif dalam kegiatan desa. Adanya istilah teknis dan kompleksitas kebijakan terkadang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Perbedaan signifikan terlihat antara pemahaman pelanggan KSM dan non-pelanggan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan komprehensif untuk memastikan kejelasan informasi kebijakan pengelolaan sampah dapat menjangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.	

Item	Hasil Wawancara	
7.	Aspek : Komunikasi	
	Sub Aspek : Konsistensi pesan kebijakan yang disampaikan kepada berbagai pihak	
	Pertanyaan : Apakah ada konsistensi dalam pesan kebijakan yang disampaikan kepada berbagai pihak? Jika ada perbedaan, mengapa?	
	SD	<i>"Kami selalu berusaha menyampaikan informasi yang konsisten ke semua pihak. Namun, terkadang ada perbedaan detail informasi yang disampaikan ke masyarakat umum dan ke petugas lapangan. Ini karena petugas lapangan membutuhkan informasi teknis yang lebih mendalam."</i>
	HY	<i>"Secara umum, pesan kebijakan yang kami terima dari pemerintah kabupaten konsisten. Namun, kadang ada perbedaan penekanan antara yang disampaikan ke pemerintah desa dan ke KSM. Misalnya, ke kami lebih ditekankan aspek administratif, sementara ke KSM lebih ke aspek operasional."</i>
	WR	<i>"Informasi yang kami terima dari atasan cukup konsisten. Tapi kadang ada perubahan kecil dalam instruksi kerja, yang mungkin disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini bukan masalah besar bagi kami, justru membuat pekerjaan lebih efektif."</i>
	PW	<i>"Sejauh yang saya tahu, informasi yang disampaikan ke kami sebagai pelanggan cukup konsisten. Namun, kadang ada perbedaan antara yang disampaikan melalui selebaran resmi dan yang dijelaskan langsung oleh petugas pengangkut sampah."</i>
AM	<i>"Saya pernah mendengar informasi yang sedikit berbeda antara yang disampaikan di pertemuan warga dan yang ada di papan pengumuman desa. Ini membuat saya sedikit bingung tentang kebijakan pengelolaan sampah yang sebenarnya."</i>	
Kesimpulan item nomor 7	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, terdapat upaya untuk menjaga konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan pengelolaan sampah, namun masih ditemui beberapa perbedaan dalam praktiknya. Perbedaan ini terutama terlihat dalam hal detail informasi yang disampaikan kepada berbagai pihak, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan informasi yang berbeda-beda antara petugas teknis, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Adanya penyesuaian informasi berdasarkan kondisi lapangan juga berkontribusi pada variasi pesan yang diterima. Meskipun perbedaan ini tidak dianggap sebagai masalah besar oleh sebagian informan, namun dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama yang belum menjadi pelanggan KSM. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menyeragamkan pesan inti kebijakan, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk detail teknis yang mungkin perlu disesuaikan. Peningkatan koordinasi antar pihak dalam penyampaian informasi dan penggunaan berbagai saluran komunikasi secara konsisten dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang ada.	

Item	Hasil Wawancara
8.	Aspek : Komunikasi
	Sub Aspek : Efektivitas sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Karangcegak
	Pertanyaan : Bagaimana efektivitas sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Karangcegak? Metode apa yang digunakan?
SD	<i>"Kami melakukan sosialisasi melalui berbagai cara. Ada pertemuan rutin di tingkat RT/RW, penyebaran brosur, dan juga menggunakan media sosial desa. Efektivitasnya cukup baik, terutama untuk metode tatap muka langsung. Namun, masih ada tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat."</i>
HY	<i>"Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kami menggunakan pendekatan formal melalui musyawarah desa dan juga informal melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Efektivitasnya terlihat dari meningkatnya partisipasi warga dalam program pengelolaan sampah, meski belum mencapai target yang diharapkan."</i>
WR	<i>"Saya sering terlibat dalam sosialisasi door-to-door. Metode ini cukup efektif karena kami bisa langsung menjawab pertanyaan warga. Kami juga kadang mengadakan demo pemilahan sampah di acara-acara desa. Respon masyarakat cukup positif, terutama ibu-ibu rumah tangga."</i>
PW	<i>"Sosialisasi yang saya rasakan cukup efektif. Saya mendapatkan informasi dari pertemuan RT dan juga dari brosur yang dibagikan. Yang paling berkesan adalah ketika ada petugas yang langsung menjelaskan cara memilah sampah di rumah saya."</i>
AM	<i>"Saya pernah menghadiri sosialisasi di balai desa, tapi merasa informasinya kurang detail. Saya lebih suka jika ada demonstrasi langsung atau video praktis tentang cara mengelola sampah. Mungkin bisa ditingkatkan lagi frekuensi dan metode sosialisasinya."</i>
Kesimpulan item nomor 8	<p>Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak dilakukan melalui berbagai metode, yang mencakup pertemuan formal di tingkat desa dan RT/RW, penyebaran brosur, penggunaan media sosial, sosialisasi door-to-door, serta demonstrasi langsung. Efektivitas sosialisasi ini cenderung positif, terutama untuk metode yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat seperti pertemuan tatap muka dan sosialisasi door-to-door. Pendekatan multi-channel ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal frekuensi, kedetailan informasi, dan penggunaan metode yang lebih interaktif seperti demonstrasi langsung atau video praktis. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mencapai target partisipasi yang diharapkan. Perbedaan preferensi metode sosialisasi di antara warga juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.</p>

Item	Hasil Wawancara	
9.	Aspek : Sumber daya	
	Sub Aspek : Kecukupan jumlah staf pengelola TPST Karangcegak	
	Pertanyaan : Apakah jumlah staf pengelola TPST Karangcegak sudah mencukupi? Jika belum, apa kendalanya?	
	SD	<i>"Saat ini kami memiliki 30 pekerja pemilah sampah. Jumlah ini sebenarnya sudah ideal untuk menangani volume sampah yang masuk setiap harinya karena pada dasarnya kami sering kekurangan sampah.. Apabila sampah yang masuk sangat banyak, kelebihan sampah akan dikerjakan besok harinya. Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran untuk menambah mesin pencacah sampah.."</i>
	HY	<i>"Dari pengamatan kami, jumlah staf di TPST sudah ideal dan sangat komitmen.. Mencari tenaga kerja yang mau bekerja di bidang persampahan juga tidak mudah karena masih adanya stigma negatif terhadap pekerjaan ini."</i>
	WR	<i>"Menurut saya, jumlah kami sudah cukup. . Kadang kami malah kekurangan sampah.."</i>
	PW	<i>"Saya perhatikan petugas pengangkut sampah selalu datang tepat waktu.."</i>
AM	<i>"Saya kurang tahu persis jumlah stafnya, tapi dari yang saya lihat, sepertinya mereka cukup sibuk. Kalau memang volumenya besar, mungkin perlu tambahan tenaga kerja. Tapi saya juga paham kalau ada keterbatasan dana."</i>	
Kesimpulan item nomor 9	Berdasarkan wawancara dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa jumlah staf di TPST Karangcegak saat ini dianggap ideal untuk menangani volume sampah harian. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait keterbatasan anggaran, yang menghalangi penambahan mesin pencacah sampah, yang menjadi salah satu kebutuhan utama. Pekerja di TPST merasa bahwa mereka memiliki jumlah staf yang memadai, bahkan kadang kala kekurangan sampah untuk diolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam mengelola volume sampah yang fluktuatif, sistem pengelolaan sudah berjalan efektif dalam kondisi normal. Di sisi lain, pemerintah desa menyadari komitmen tinggi dari staf TPST namun juga mencatat adanya stigma negatif yang menyulitkan perekrutan tenaga kerja baru di bidang persampahan. Pengamatan warga menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah berlangsung tepat waktu, menandakan efisiensi operasional dari tim yang ada. Namun, bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi internal TPST, ada kesan bahwa tambahan tenaga kerja mungkin diperlukan jika volume sampah meningkat. Meskipun demikian, mereka juga memahami bahwa keterbatasan dana menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah ini.	

Item	Hasil Wawancara	
10.	Aspek : Sumber daya	
	Sub Aspek : Kompetensi dan keahlian staf dalam pengelolaan sampah	
	Pertanyaan : Bagaimana kompetensi dan keahlian staf dalam pengelolaan sampah? Apakah ada program pelatihan khusus?	
	SD	<i>"Staf kami memiliki kompetensi dasar dalam pemilahan sampah. Kami memberikan pelatihan awal saat mereka bergabung, terutama tentang jenis-jenis sampah dan cara pemilahan yang benar. Untuk pelatihan lanjutan, kami mengandalkan program dari Dinas Lingkungan Hidup yang diadakan setahun sekali."</i>
	HY	<i>"Secara umum, kompetensi staf TPST cukup baik. Mereka terampil dalam pemilahan sampah dan pengoperasian mesin sederhana. Pemerintah desa mendukung program pelatihan yang diadakan KSM, terutama dalam hal keselamatan kerja dan penanganan sampah B3."</i>
	WR	<i>"Saya merasa cukup mampu melakukan tugas pemilahan sampah. Kami pernah mendapat pelatihan dasar, tapi jarang ada pelatihan lanjutan. Akan lebih baik jika ada pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan kami, terutama dalam penggunaan teknologi baru."</i>
	PW	<i>"Menurut pengamatan saya, petugas pengangkut sampah cukup terampil dalam pekerjaannya. Mereka bisa membedakan jenis sampah dengan baik. Tapi saya tidak tahu apakah mereka mendapat pelatihan khusus atau tidak."</i>
AM	<i>"Saya pernah melihat petugas TPST bekerja dan mereka tampak cukup ahli. Tapi saya rasa akan lebih baik jika ada pelatihan rutin untuk mereka, terutama tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan."</i>	
Kesimpulan item nomor 10	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa staf pengelola TPST Karangcegak memiliki kompetensi dasar yang cukup dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan sampah dan pengoperasian mesin sederhana. KSM Mekarsari memberikan pelatihan awal kepada staf baru, fokus pada pengenalan jenis sampah dan teknik pemilahan yang benar. Pelatihan lanjutan diperoleh melalui program tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah desa juga mendukung dengan pelatihan tambahan, terutama terkait keselamatan kerja dan penanganan sampah B3. Meskipun demikian, frekuensi pelatihan lanjutan masih terbatas dan ada keinginan dari staf untuk mendapatkan pelatihan yang lebih rutin, terutama dalam penggunaan teknologi baru dan metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap kompetensi staf umumnya positif, namun ada saran untuk peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang lebih intensif. Secara keseluruhan, while kompetensi dasar staf dinilai memadai, masih ada ruang untuk peningkatan melalui program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.	

Item	Hasil Wawancara	
11.	Aspek : Sumber daya	
	Sub Aspek : Ketersediaan anggaran untuk operasional TPST	
	Pertanyaan : Bagaimana ketersediaan anggaran untuk operasional TPST? Apakah mencukupi untuk kebutuhan saat ini?	
	SD	<i>"Anggaran operasional TPST saat ini berasal dari retribusi warga dan penjualan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Secara umum, anggaran ini cukup untuk operasional harian, tapi kami masih kesulitan untuk melakukan pengembangan atau perbaikan besar. Kami tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah daerah."</i>
	HY	<i>"Dari laporan yang kami terima, anggaran TPST untuk operasional dasar sudah mencukupi. Namun, untuk pengembangan dan investasi peralatan baru, masih perlu dukungan tambahan. Kami sedang mengkaji kemungkinan alokasi dana desa untuk mendukung TPST."</i>
	WR	<i>"Sejauh yang saya tahu, gaji kami selalu dibayar tepat waktu. Tapi untuk perbaikan alat atau penambahan fasilitas, sering kali harus menunggu lama karena katanya anggaran terbatas."</i>
	PW	<i>"Saya rasa retribusi yang kami bayar cukup wajar. Tapi saya tidak tahu apakah itu sudah cukup untuk operasional TPST. Yang penting bagi saya, layanan pengangkutan sampah tetap berjalan lancar."</i>
AM	<i>"Saya pernah dengar bahwa TPST mengandalkan retribusi dan penjualan sampah untuk operasionalnya. Tapi apakah itu cukup, saya kurang tahu. Mungkin perlu ada transparansi anggaran agar masyarakat lebih paham."</i>	
Kesimpulan item nomor 11	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran untuk operasional TPST Karangcegak saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih terbatas untuk pengembangan dan investasi jangka panjang. Sumber utama anggaran berasal dari retribusi warga dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis, tanpa adanya subsidi dari pemerintah daerah. Anggaran yang ada mampu menutupi biaya operasional harian, termasuk pembayaran gaji karyawan secara tepat waktu. Namun, untuk kebutuhan pengembangan, perbaikan besar, atau investasi peralatan baru, TPST masih menghadapi keterbatasan dana. Pemerintah desa menyadari situasi ini dan sedang mempertimbangkan alokasi dana desa untuk mendukung TPST. Persepsi masyarakat terhadap retribusi umumnya positif, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun anggaran saat ini mencukupi untuk operasional dasar, masih diperlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas TPST Karangcegak di masa depan.	

Item	Hasil Wawancara
12.	<p>Aspek : Sumber daya</p> <p>Sub Aspek : Kelengkapan fasilitas dan peralatan di TPST (seperti alat pemilah sampah, kendaraan pengangkut)</p> <p>Pertanyaan : Sejauh mana kelengkapan fasilitas dan peralatan di TPST, seperti alat pemilah sampah dan kendaraan pengangkut?</p> <p>SD <i>"TPST kami memiliki fasilitas dasar seperti mesin pemilah sampah (gibrig), ban berjalan, dan alat pengepres sampah plastik-kertas. Kami juga punya satu truk pengangkut sampah. Namun, kami masih kekurangan mesin pencacah sampah untuk RDF yang kapasitasnya lebih besar. Beberapa peralatan juga sudah mulai aus dan perlu peremajaan."</i></p> <p>HY <i>"Secara umum, fasilitas di TPST cukup lengkap untuk operasional dasar. Pemerintah daerah telah menyediakan peralatan utama. Namun, kami menyadari perlu ada peningkatan, terutama untuk kendaraan pengangkut yang saat ini masih terbatas jumlahnya."</i></p> <p>WR <i>"Peralatan yang ada cukup membantu pekerjaan kami. Mesin pemilah dan ban berjalan sangat memudahkan proses pemilahan. Tapi kadang kami kesulitan saat ada kerusakan mesin karena proses perbaikan memakan waktu."</i></p> <p>PW <i>"Saya pernah berkunjung ke TPST dan melihat mereka punya peralatan yang cukup modern. Truk pengangkut sampah juga selalu datang tepat waktu. Tapi mungkin perlu ditambah jumlahnya agar bisa menjangkau lebih banyak rumah."</i></p> <p>AM <i>"Saya tidak tahu persis fasilitas apa saja yang ada di TPST. Tapi dari yang saya dengar, mereka punya mesin-mesin untuk mengolah sampah. Mungkin perlu ada sosialisasi tentang fasilitas yang dimiliki TPST agar masyarakat lebih paham."</i></p>
Kesimpulan item nomor12	<p>Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki fasilitas dan peralatan dasar yang cukup memadai untuk operasional pengelolaan sampah. Peralatan utama seperti mesin pemilah sampah (gibrig), ban berjalan, alat pengepres sampah plastik-kertas, dan truk pengangkut sampah telah tersedia. Fasilitas ini dinilai cukup modern dan membantu efisiensi kerja para petugas. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan tantangan yang dihadapi. TPST membutuhkan mesin pencacah sampah berkapasitas lebih besar untuk pengolahan RDF, serta peremajaan beberapa peralatan yang sudah mulai aus. Jumlah kendaraan pengangkut sampah juga masih terbatas dan perlu ditambah untuk meningkatkan jangkauan layanan. Meskipun fasilitas yang ada sudah cukup untuk operasional dasar, masih diperlukan peningkatan dan penambahan peralatan untuk mengoptimalkan kinerja TPST. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang fasilitas yang dimiliki TPST untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap pengelolaan sampah di Karangcegak.</p>

Item	Hasil Wawancara		
13.	Aspek	: Disposisi	
	Sub Aspek	: Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah	
	Pertanyaan	: Sejauh mana pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah? Adakah kesulitan dalam memahami kebijakan tersebut?	
	SD	<i>"Kami cukup memahami kebijakan pengelolaan sampah yang ditetapkan pemerintah. Kami rutin mengikuti sosialisasi dan pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun, terkadang ada perubahan regulasi yang membutuhkan waktu untuk kami sesuaikan dalam implementasinya."</i>	
	HY	<i>"Secara umum, para pelaksana di tingkat desa cukup paham dengan kebijakan yang ada. Kami berusaha mensosialisasikan ke masyarakat. Tantangannya lebih pada penerapan di lapangan, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat."</i>	
	WR	<i>"Saya paham tugas saya dalam pemilahan sampah sesuai kebijakan yang ada. Tapi untuk detail-detail kebijakan, saya tidak terlalu mengerti. Yang penting bagi saya adalah melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua KSM."</i>	
	PW	<i>"Saya melihat petugas KSM cukup paham dengan tugasnya. Mereka bisa menjelaskan kepada kami tentang pemilahan sampah dan jadwal pengambilan. Tapi mungkin masih perlu sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat."</i>	
AM	<i>"Saya kurang tahu sejauh mana pemahaman petugas KSM. Tapi dari yang saya lihat, mereka sepertinya mengerti apa yang harus dilakukan dalam mengelola sampah di desa kami."</i>		
Kesimpulan item nomor 13	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak cukup baik, terutama di tingkat pengelola utama seperti Ketua KSM dan perangkat desa. Mereka telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan dari instansi terkait, sehingga memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan yang berlaku. Namun, tingkat pemahaman ini bervariasi tergantung pada posisi dan peran masing-masing pelaksana. Pekerja lapangan seperti pemilah sampah lebih fokus pada pemahaman praktis terkait tugas mereka, sementara pemahaman mendalam tentang kebijakan lebih dimiliki oleh para pengambil keputusan. Tantangan yang dihadapi lebih pada implementasi kebijakan di lapangan, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan mengubah kebiasaan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi berkelanjutan, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pemahaman pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi dan pemahaman bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat.		

Item	Hasil Wawancara	
14.	Aspek : Disposisi	
	Sub Aspek : Komitmen dan dedikasi pengelola TPST dalam menjalankan tugas	
	Pertanyaan : Bagaimana komitmen dan dedikasi pengelola TPST dalam menjalankan tugas mereka	
	SD	<i>"Saya dan tim berusaha memberikan yang terbaik dalam mengelola TPST. Kami bekerja dari pagi hingga sore, bahkan terkadang sampai malam jika ada masalah mendadak. Komitmen kami adalah menjadikan desa ini bebas dari masalah sampah."</i>
	HY	<i>"Saya melihat dedikasi yang tinggi dari pengelola TPST. Mereka selalu siap saat dibutuhkan dan proaktif dalam mengatasi masalah. Bahkan saat ada kendala anggaran, mereka tetap berusaha mencari solusi kreatif."</i>
	WR	<i>"Kami bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Meskipun pekerjaan ini berat dan kotor, kami sadar pentingnya tugas ini untuk kebersihan desa. Ketua kami selalu memberi semangat dan contoh yang baik."</i>
	PW	<i>"Saya kagum dengan kerja keras pengelola TPST. Mereka selalu tepat waktu dalam mengambil sampah dan responsif jika ada keluhan. Dedikasi mereka membuat lingkungan kami jadi lebih bersih."</i>
AM	<i>"Saya sering melihat petugas TPST bekerja dari pagi-pagi sekali. Mereka tampak serius dan tekun dalam menjalankan tugas. Ini membuat saya tertarik untuk bergabung sebagai pelanggan KSM."</i>	
Kesimpulan item nomor 14	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan dedikasi pengelola TPST di Desa Karangcegak sangat tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Para pengelola, mulai dari ketua KSM hingga pekerja lapangan, menunjukkan etos kerja yang kuat dengan bekerja keras dari pagi hingga sore, bahkan terkadang hingga malam hari jika diperlukan. Mereka memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa. Komitmen ini tercermin dari kesiapan mereka dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk kendala anggaran, dengan mencari solusi kreatif. Dedikasi mereka juga terlihat dari konsistensi dalam memberikan layanan yang baik, seperti ketepatan waktu dalam pengambilan sampah dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Sikap proaktif dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh para pengelola tidak hanya berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menginspirasi dan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Komitmen dan dedikasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, menciptakan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpotensi menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa.	

Item	Hasil Wawancara	
15.	Aspek : Disposisi	
	Sub Aspek : Sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah	
	Pertanyaan : Bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah? Apakah ada resistensi atau dukungan?	
	SD	<i>"Secara umum, masyarakat cukup mendukung program kami. Namun, masih ada sebagian kecil yang belum paham pentingnya pengelolaan sampah. Kami terus berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka."</i>
	HY	<i>"Awalnya ada sedikit resistensi, terutama terkait biaya retribusi. Tapi setelah melihat manfaatnya, banyak warga yang mulai mendukung. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu sosialisasi."</i>
	WR	<i>"Sebagian besar warga sudah cukup bekerjasama dalam mengikuti program pengelolaan sampah. Mereka sudah mulai memisahkan sampah basah dan kering, yang membantu kami dalam proses pengolahan di TPST. Namun, kami lebih suka jika sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis tetap dikirim ke TPST, karena ini membantu operasional kami. Yang masih jadi tantangan adalah beberapa warga yang masih mencampur semua jenis sampah atau bahkan membuangnya sembarangan."</i>
	PW	<i>"Saya dan keluarga sangat mendukung program ini. Lingkungan jadi lebih bersih. Tapi saya tahu beberapa tetangga masih keberatan dengan biaya retribusi, meskipun sebenarnya tidak terlalu mahal."</i>
AM	<i>"Saya belum bergabung karena masih ragu dengan manfaatnya. Tapi melihat lingkungan tetangga yang lebih bersih, saya mulai tertarik. Mungkin perlu lebih banyak informasi tentang programnya."</i>	
Kesimpulan item nomor 15	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak cenderung positif, namun masih terdapat beberapa tantangan dan kompleksitas dalam implementasinya. Secara umum, terdapat dukungan dari sebagian besar masyarakat yang telah merasakan manfaat langsung dari program pengelolaan sampah, seperti lingkungan yang lebih bersih. Namun, masih ada resistensi dari sebagian kecil masyarakat, terutama terkait dengan biaya retribusi dan kurangnya pemahaman tentang sistem pengelolaan sampah yang optimal. Proses adaptasi masyarakat terhadap kebijakan ini berjalan secara bertahap, dengan tantangan dalam menyeimbangkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan operasional TPST. Meskipun pemilahan dasar sampah di rumah tangga diapresiasi, TPST masih membutuhkan aliran sampah anorganik bernilai ekonomis untuk mendukung operasionalnya. Peran aktif pemerintah desa dan pengelola TPST dalam melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelaraskan pemahaman masyarakat dengan kebutuhan sistem pengelolaan sampah. Meskipun masih ada tantangan seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang belum sepenuhnya hilang, tren positif dalam sikap masyarakat menunjukkan potensi keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah sambil tetap mendukung keberlanjutan operasional TPST.	

Item	Hasil Wawancara
16.	Aspek : Disposisi
	Sub Aspek : Insentif bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif
	Pertanyaan : Apakah ada sistem insentif bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif? , jika ada, bagaimana bentuknya?
SD	<i>"Kami memiliki sistem insentif sederhana untuk pekerja TPST. Mereka mendapat bonus jika berhasil mencapai target pengolahan sampah bulanan. Untuk masyarakat, kami memberikan pengurangan biaya retribusi bagi yang rutin memilah sampah dengan baik."</i>
HY	<i>"Desa mendukung program insentif TPST dengan mengalokasikan sebagian dana desa untuk penghargaan RT/RW terbersih setiap tahun. Kami juga memberikan sertifikat penghargaan kepada warga yang aktif dalam program pengelolaan sampah."</i>
WR	<i>"Kami senang dengan adanya bonus bulanan. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih giat. Tapi yang lebih penting, kami merasa dihargai atas kerja keras kami."</i>
PW	<i>"Saya senang dengan adanya pengurangan biaya retribusi jika rutin memilah sampah. Ini mendorong keluarga saya untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah. Kami juga pernah mendapat voucher belanja dari desa karena aktif dalam program ini."</i>
AM	<i>"Saya baru tahu ada insentif untuk warga yang aktif dalam program sampah. Ini menarik dan bisa jadi pertimbangan saya untuk bergabung. Tapi saya rasa, kesadaran akan lingkungan bersih seharusnya jadi motivasi utama."</i>
Kesimpulan item nomor 16	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem insentif yang diterapkan baik untuk pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah di Desa Karangcegak. Sistem insentif ini bervariasi dan mencakup berbagai bentuk. Untuk pelaksana kebijakan, khususnya pekerja TPST, insentif diberikan dalam bentuk bonus finansial yang terkait dengan pencapaian target pengolahan sampah. Hal ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Sementara itu, untuk masyarakat, insentif diberikan dalam beberapa bentuk, termasuk pengurangan biaya retribusi sampah bagi yang secara konsisten melakukan pemilahan sampah dengan baik, serta penghargaan berupa sertifikat dan voucher belanja. Program penghargaan tingkat RT/RW terbersih yang didukung dana desa juga menjadi bentuk insentif yang mendorong partisipasi kolektif masyarakat. Meskipun sistem insentif ini disambut positif dan dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi, ada pandangan bahwa kesadaran lingkungan seharusnya menjadi motivasi utama. Keberadaan sistem insentif ini menunjukkan upaya komprehensif dari pihak pengelola dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada reward jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Lanjutan Olah Data Hasil Wawancara Aspek Birokrasi

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
1.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, TPST Karanggegak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan sampah. Keberadaan SOP ini dikonfirmasi oleh Ketua KSM Mekarsari, Kepala Desa, dan pekerja pemilahan sampah. SOP tersebut dinilai cukup rinci, mencakup berbagai tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga pemasaran hasil olahan. Dalam praktiknya, SOP ini diterapkan dalam operasional sehari-hari TPST, dengan adanya petunjuk visual di tempat kerja dan pengawasan dari mandor untuk memastikan kepatuhan. Meskipun demikian, sosialisasi SOP kepada masyarakat umum tampaknya masih terbatas. Pelanggan KSM mengamati bahwa petugas TPST bekerja dengan teratur, yang mengindikasikan adanya prosedur yang jelas, namun mereka tidak mengetahui detail SOP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah ada dan diterapkan dengan baik di internal TPST, masih ada ruang untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan sampah di TPST Karanggegak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terinci untuk pengelolaan sampah 2) SOP mencakup tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga pemasaran hasil olahan 3) Implementasi SOP dilakukan melalui petunjuk visual di tempat kerja dan pengawasan mandor 4) Sosialisasi SOP kepada masyarakat umum masih terbatas 5) Perlu peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu optimalisasi sosialisasi SOP untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, dengan fokus pada komunikasi detail prosedur pengelolaan sampah. 	Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek birokrasi, dapat disimpulkan bahwa TPST Karanggegak memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara berbagai instansi terkait, serta mekanisme koordinasi yang berjalan cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian lebih, seperti peningkatan sosialisasi SOP dan peran instansi kepada masyarakat umum, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam proses koordinasi pengelolaan sampah. Selain itu, struktur organisasi yang fleksibel di TPST Karanggegak memungkinkan adaptasi cepat terhadap berbagai tantangan, yang didukung oleh kerjasama yang baik antara KSM Mekar Sari dan Pemerintah Desa
2	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas antara Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan KSM Mekar Sari dalam pengelolaan sampah di TPST Karanggegak. KSM Mekar Sari berperan sebagai pelaksana utama, bertanggung jawab atas operasional harian TPST, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemasaran hasil olahan sampah. Pemerintah Desa berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan lahan untuk TPST, membantu sosialisasi program ke masyarakat, mengeluarkan SK kepengurusan KSM, dan menjembatani koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, DLH berperan dalam memberikan panduan teknis, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta membantu dalam pengadaan dan pemeliharaan alat-alat berat. DLH juga bertanggung jawab memastikan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun pembagian tugas ini	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembagian tugas yang jelas antara KSM Mekar Sari, Pemerintah Desa, dan DLH 2) KSM Mekar Sari berperan sebagai pelaksana utama operasional TPST 3) Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator 4) DLH memberikan panduan teknis dan melakukan monitoring 5) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pembagian peran masing-masing instansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan strategi komunikasi komprehensif untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi kepada masyarakat luas. 	

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
	cukup dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, pemahaman masyarakat umum, terutama yang belum menjadi pelanggan KSM, masih terbatas mengenai detail peran masing-masing instansi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang struktur dan pembagian tanggung jawab dalam sistem pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.				
3	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak berjalan cukup baik dan terstruktur. Terdapat mekanisme koordinasi formal berupa rapat rutin bulanan antara KSM Mekarsari, Pemerintah Desa, dan perwakilan DLH, serta pertemuan triwulanan yang juga melibatkan tokoh masyarakat. Selain itu, ada pula saluran komunikasi informal melalui grup WhatsApp untuk penanganan masalah yang bersifat mendesak. KSM Mekarsari secara rutin menyampaikan laporan bulanan kepada Pemerintah Desa dan DLH, memastikan aliran informasi yang konsisten. Pemerintah Desa berperan aktif sebagai fasilitator, menyelenggarakan forum-forum diskusi dan menjembatani komunikasi antara KSM, masyarakat, dan instansi terkait. DLH berperan dalam mensosialisasikan kebijakan baru dari tingkat kabupaten. Meskipun koordinasi di tingkat pengambil kebijakan terlihat berjalan dengan baik, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses koordinasi ini masih bervariasi. Pelanggan KSM cenderung lebih mengetahui tentang adanya forum-forum koordinasi dibandingkan dengan non-pelanggan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi antar lembaga berjalan terstruktur melalui rapat rutin bulanan dan triwulanan 2) Komunikasi informal menggunakan media digital (WhatsApp) 3) KSM Mekarsari menyampaikan laporan bulanan secara berkala 4) Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator komunikasi 5) Keterlibatan masyarakat dalam koordinasi masih bervariasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses koordinasi antar lembaga. 	
4.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, struktur organisasi dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak menunjukkan tingkat fleksibilitas yang cukup baik. KSM Mekar Sari mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai tantangan dan perubahan situasi, seperti kerusakan mesin, lonjakan volume sampah, atau kondisi cuaca ekstrem. Fleksibilitas ini terlihat dari kemampuan mereka untuk membentuk tim khusus, melakukan rotasi tugas, dan menyesuaikan alokasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Pemerintah desa juga berperan dalam mendukung fleksibilitas ini dengan kesiapan memberikan bantuan tambahan bila diperlukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi KSM memiliki fleksibilitas tinggi 2) Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan dan perubahan situasi 3) Pembentukan tim khusus dan rotasi tugas sesuai kebutuhan 4) Dukungan Pemerintah Desa dalam menghadapi perubahan 5) Penyesuaian alokasi sumber daya manusia secara dinamis 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptabilitas Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan dan tingkatkan fleksibilitas organisasi dengan fokus pada adaptabilitas dan responsivitas terhadap perubahan kondisi. 	

b. Kesimpulan Aspek Hasil Wawancara Aspek Komunikasi

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
5.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, proses distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa dilakukan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur. Dimulai dengan sosialisasi dari DLH Kabupaten kepada perwakilan desa dan KSM, dilanjutkan dengan penyampaian surat edaran resmi yang menjelaskan detail kebijakan. Selanjutnya, diadakan pertemuan koordinasi di tingkat kecamatan untuk membahas implementasi. Pemerintah Desa berperan penting dalam menjembatani distribusi kebijakan ini dengan mengadakan musyawarah desa untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan implementasi kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan. KSM juga dilibatkan dalam proses ini melalui undangan ke rapat-rapat di tingkat kabupaten. Meskipun proses distribusi di tingkat pengambil kebijakan terlihat jelas, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini masih bervariasi. Pekerja di lapangan dan masyarakat umum cenderung menerima informasi melalui sosialisasi langsung, selebaran, atau pengumuman publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendistribusikan kebijakan secara menyeluruh, masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum terlibat langsung dalam program pengelolaan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 6) Distribusi kebijakan melalui mekanisme terstruktur 7) Sosialisasi berjenjang dari kabupaten hingga desa 8) Variasi pemahaman di tingkat masyarakat 9) Kebutuhan peningkatan efektivitas penyampaian informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu strategi distribusi yang lebih inklusif 	Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek komunikasi, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karanggegak telah berjalan dengan cukup terstruktur dan mencakup berbagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pelaksana dan masyarakat. Distribusi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa melalui sosialisasi, surat edaran, dan pertemuan koordinasi telah membantu dalam penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Namun, ada variasi dalam kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat umum, dengan perbedaan yang terlihat antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi. Meskipun konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan berusaha dijaga, terdapat perbedaan dalam detail informasi yang diterima oleh berbagai pihak, yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi, terutama dalam menasar seluruh lapisan masyarakat, agar informasi kebijakan pengelolaan sampah
6.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat bervariasi. Untuk pelaksana dan pekerja di TPST, informasi cenderung disampaikan dengan jelas melalui briefing rutin, pelatihan khusus, dan panduan tertulis. Namun, untuk masyarakat umum, tingkat kejelasan informasi lebih beragam. KSM dan Pemerintah Desa telah melakukan upaya penyampaian informasi melalui berbagai media seperti brosur, spanduk, sosialisasi door-to-door, pertemuan RT/RW, dan media sosial. Meski demikian, masih ada tantangan dalam memastikan informasi sampai dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum menjadi pelanggan KSM atau kurang aktif dalam kegiatan desa. Adanya istilah teknis dan kompleksitas kebijakan terkadang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Perbedaan signifikan terlihat antara pemahaman pelanggan KSM dan non-pelanggan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Variasi pesan sesuai kebutuhan informasi 2) Penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan 3) Potensi kebingungan masyarakat 4) Kebutuhan penyeragaman pesan inti 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan pendekatan komunikasi komprehensif 	Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek komunikasi, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karanggegak telah berjalan dengan cukup terstruktur dan mencakup berbagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pelaksana dan masyarakat. Distribusi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa melalui sosialisasi, surat edaran, dan pertemuan koordinasi telah membantu dalam penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Namun, ada variasi dalam kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat umum, dengan perbedaan yang terlihat antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi. Meskipun konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan berusaha dijaga, terdapat perbedaan dalam detail informasi yang diterima oleh berbagai pihak, yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi, terutama dalam menasar seluruh lapisan masyarakat, agar informasi kebijakan pengelolaan sampah

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
	Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan komprehensif untuk memastikan kejelasan informasi kebijakan pengelolaan sampah dapat menjangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.				dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan merata.
7.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, terdapat upaya untuk menjaga konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan pengelolaan sampah, namun masih ditemui beberapa perbedaan dalam praktiknya. Perbedaan ini terutama terlihat dalam hal detail informasi yang disampaikan kepada berbagai pihak, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan informasi yang berbeda-beda antara petugas teknis, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Adanya penyesuaian informasi berdasarkan kondisi lapangan juga berkontribusi pada variasi pesan yang diterima. Meskipun perbedaan ini tidak dianggap sebagai masalah besar oleh sebagian informan, namun dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama yang belum menjadi pelanggan KSM. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menyeragamkan pesan inti kebijakan, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk detail teknis yang mungkin perlu disesuaikan. Peningkatan koordinasi antar pihak dalam penyampaian informasi dan penggunaan berbagai saluran komunikasi secara konsisten dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendekatan multi-channel 2) Efektivitas metode interaktif 3) Keragaman preferensi sosialisasi 4) Tantangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas pihak untuk harmonisasi pesan 	
8	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak dilakukan melalui berbagai metode, yang mencakup pertemuan formal di tingkat desa dan RT/RW, penyebaran brosur, penggunaan media sosial, sosialisasi door-to-door, serta demonstrasi langsung. Efektivitas sosialisasi ini cenderung positif, terutama untuk metode yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat seperti pertemuan tatap muka dan sosialisasi door-to-door. Pendekatan multi-channel ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal frekuensi, kedetailan informasi, dan penggunaan metode yang lebih interaktif seperti demonstrasi langsung atau video praktis. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mencapai target partisipasi yang diharapkan. Perbedaan preferensi metode sosialisasi di antara warga juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendekatan multi-channel 2) Efektivitas metode interaktif 3) Keragaman preferensi sosialisasi 4) Tantangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pendekatan adaptif dan personal 	

Kesimpulan Aspek Hasil Wawancara Aspek Sumber Daya

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
9 .	Berdasarkan wawancara dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa jumlah staf di TPST Karangcegak saat ini dianggap ideal untuk menangani volume sampah harian. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait keterbatasan anggaran, yang menghalangi penambahan mesin pencacah sampah, yang menjadi salah satu kebutuhan utama. Pekerja di TPST merasa bahwa mereka memiliki jumlah staf yang memadai, bahkan kadang kala kekurangan sampah untuk diolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam mengelola volume sampah yang fluktuatif, sistem pengelolaan sudah berjalan efektif dalam kondisi normal. Di sisi lain, pemerintah desa menyadari komitmen tinggi dari staf TPST namun juga mencatat adanya stigma negatif yang menyulitkan perekrutan tenaga kerja baru di bidang persampahan. Pengamatan warga menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah berlangsung tepat waktu, menandakan efisiensi operasional dari tim yang ada. Namun, bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi internal TPST, ada kesan bahwa tambahan tenaga kerja mungkin diperlukan jika volume sampah meningkat. Meskipun demikian, mereka juga memahami bahwa keterbatasan dana menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah staf dianggap ideal untuk volume sampah 2) Kendala keterbatasan anggaran 3) Komitmen tinggi staf 4) Stigma pekerjaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu strategi rekrutmen dan peningkatan citra pekerjaan 	Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek sumber daya, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki sumber daya manusia, kompetensi, anggaran, serta fasilitas dan peralatan yang cukup memadai untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Meskipun jumlah staf dianggap ideal dan kompetensi dasar mereka dinilai cukup, ada tantangan terkait keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengembangan lebih lanjut dan penambahan fasilitas yang diperlukan, seperti mesin pencacah sampah dan kendaraan pengangkut. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan lanjutan dan pengadaan peralatan baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas operasional di masa mendatang. Kendala dalam anggaran, meski cukup untuk operasional dasar, masih memerlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan TPST. Secara keseluruhan, meskipun TPST telah beroperasi dengan efisien dalam kondisi yang ada, diperlukan perhatian lebih pada pengembangan sumber daya untuk menghadapi tantangan di
10.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa staf pengelola TPST Karangcegak memiliki kompetensi dasar yang cukup dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan sampah dan pengoperasian mesin sederhana. KSM Mekarsari memberikan pelatihan awal kepada staf baru, fokus pada pengenalan jenis sampah dan teknik pemilahan yang benar. Pelatihan lanjutan diperoleh melalui program tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah desa juga mendukung dengan pelatihan tambahan, terutama terkait keselamatan kerja dan penanganan sampah B3. Meskipun demikian, frekuensi pelatihan lanjutan masih terbatas dan ada keinginan dari staf untuk mendapatkan pelatihan yang lebih rutin, terutama dalam penggunaan teknologi baru dan metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap kompetensi staf umumnya positif, namun ada saran untuk peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang lebih intensif. Secara keseluruhan, while kompetensi dasar staf dinilai memadai, masih ada ruang untuk peningkatan melalui program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi dasar memadai 2) Pelatihan awal dan lanjutan terbatas 3) Keinginan peningkatan keterampilan 4) Persepsi masyarakat positif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan program pelatihan berkelanjutan 	Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek sumber daya, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki sumber daya manusia, kompetensi, anggaran, serta fasilitas dan peralatan yang cukup memadai untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Meskipun jumlah staf dianggap ideal dan kompetensi dasar mereka dinilai cukup, ada tantangan terkait keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengembangan lebih lanjut dan penambahan fasilitas yang diperlukan, seperti mesin pencacah sampah dan kendaraan pengangkut. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan lanjutan dan pengadaan peralatan baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas operasional di masa mendatang. Kendala dalam anggaran, meski cukup untuk operasional dasar, masih memerlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan TPST. Secara keseluruhan, meskipun TPST telah beroperasi dengan efisien dalam kondisi yang ada, diperlukan perhatian lebih pada pengembangan sumber daya untuk menghadapi tantangan di

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Ide Pokok	Kategori	Memos	Sub Aspek
11.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran untuk operasional TPST Karangcegak saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih terbatas untuk pengembangan dan investasi jangka panjang. Sumber utama anggaran berasal dari retribusi warga dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis, tanpa adanya subsidi dari pemerintah daerah. Anggaran yang ada mampu menutupi biaya operasional harian, termasuk pembayaran gaji karyawan secara tepat waktu. Namun, untuk kebutuhan pengembangan, perbaikan besar, atau investasi peralatan baru, TPST masih menghadapi keterbatasan dana. Pemerintah desa menyadari situasi ini dan sedang mempertimbangkan alokasi dana desa untuk mendukung TPST. Persepsi masyarakat terhadap retribusi umumnya positif, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun anggaran saat ini mencukupi untuk operasional dasar, masih diperlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas TPST Karangcegak di masa depan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anggaran cukup untuk operasional dasar 2) Sumber dana dari penjualan sampah 3) Keterbatasan dana untuk pengembangan 4) Kebutuhan transparansi pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Finansial 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu strategi pendanaan jangka panjang 	<p>masa depan dan memastikan kinerja yang optimal.</p>
12.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki fasilitas dan peralatan dasar yang cukup memadai untuk operasional pengelolaan sampah. Peralatan utama seperti mesin pemilah sampah (gibrig), ban berjalan, alat pengepres sampah plastik-kertas, dan truk pengangkut sampah telah tersedia. Fasilitas ini dinilai cukup modern dan membantu efisiensi kerja para petugas. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan tantangan yang dihadapi. TPST membutuhkan mesin pencacah sampah berkapasitas lebih besar untuk pengolahan RDF, serta peremajaan beberapa peralatan yang sudah mulai aus. Jumlah kendaraan pengangkut sampah juga masih terbatas dan perlu ditambah untuk meningkatkan jangkauan layanan. Meskipun fasilitas yang ada sudah cukup untuk operasional dasar, masih diperlukan peningkatan dan penambahan peralatan untuk mengoptimalkan kinerja TPST. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang fasilitas yang dimiliki TPST untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap pengelolaan sampah di Karangcegak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas dasar memadai 2) Kebutuhan peremajaan dan penambahan peralatan 3) Kekurangan mesin pencacah dan kendaraan 4) Perlu sosialisasi fasilitas kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dan Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi berkelanjutan untuk optimalisasi kinerja 	

c. Kesimpulan Aspek Hasil Wawancara Aspek Disposisi

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
13.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak cukup baik, terutama di tingkat pengelola utama seperti Ketua KSM dan perangkat desa. Mereka telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan dari instansi terkait, sehingga memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan yang berlaku. Namun, tingkat pemahaman ini bervariasi tergantung pada posisi dan peran masing-masing pelaksana. Pekerja lapangan seperti pemilah sampah lebih fokus pada pemahaman praktis terkait tugas mereka, sementara pemahaman mendalam tentang kebijakan lebih dimiliki oleh para pengambil keputusan. Tantangan yang dihadapi lebih pada implementasi kebijakan di lapangan, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan mengubah kebiasaan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi berkelanjutan, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pemahaman pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi dan pemahaman bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman kebijakan bervariasi antarposisi 2) Pemahaman praktis di level lapangan 3) Kebutuhan sosialisasi berkelanjutan 4) Pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Pemahaman Implementator 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pendekatan diferensiatif dalam sosialisasi 	Berdasarkan kesimpulan dari berbagai item pertanyaan pada aspek disposisi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak umumnya cukup baik, terutama di kalangan pengelola utama seperti Ketua KSM dan perangkat desa. Mereka telah memperoleh pemahaman yang memadai melalui sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait. Namun, tingkat pemahaman ini bervariasi di antara pelaksana, dengan pekerja lapangan yang lebih fokus pada aspek praktis daripada pemahaman mendalam tentang kebijakan. Selain itu, komitmen dan dedikasi pengelola TPST sangat tinggi, tercermin dari etos kerja yang kuat dan sikap proaktif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Para pengelola tidak hanya konsisten dalam memberikan layanan yang baik tetapi juga berusaha mencari solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran. Dedikasi ini telah meningkatkan kebersihan lingkungan dan menginspirasi partisipasi
14.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan dedikasi pengelola TPST di Desa Karangcegak sangat tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Para pengelola, mulai dari ketua KSM hingga pekerja lapangan, menunjukkan etos kerja yang kuat dengan bekerja keras dari pagi hingga sore, bahkan terkadang hingga malam hari jika diperlukan. Mereka memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa. Komitmen ini tercermin dari kesiapan mereka dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk kendala anggaran, dengan mencari solusi kreatif. Dedikasi mereka juga terlihat dari konsistensi dalam memberikan layanan yang baik, seperti ketepatan waktu dalam pengambilan sampah dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Sikap proaktif dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh para pengelola tidak hanya berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menginspirasi dan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Komitmen dan dedikasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, menciptakan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpotensi menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingginya etos kerja 2) Kesadaran lingkungan 3) Kemampuan mencari solusi kreatif 4) Inspirasi partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dedikasi Implementator 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen sebagai faktor kunci keberhasilan 	

Item	Kesimpulan Hasil Wawancara	Koding	Kategori	Memos	Sub Aspek
15.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak cenderung positif, namun masih terdapat beberapa tantangan dan kompleksitas dalam implementasinya. Secara umum, terdapat dukungan dari sebagian besar masyarakat yang telah merasakan manfaat langsung dari program pengelolaan sampah, seperti lingkungan yang lebih bersih. Namun, masih ada resistensi dari sebagian kecil masyarakat, terutama terkait dengan biaya retribusi dan kurangnya pemahaman tentang sistem pengelolaan sampah yang optimal. Proses adaptasi masyarakat terhadap kebijakan ini berjalan secara bertahap, dengan tantangan dalam menyeimbangkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan operasional TPST. Meskipun pemilahan dasar sampah di rumah tangga diapresiasi, TPST masih membutuhkan aliran sampah anorganik bernilai ekonomis untuk mendukung operasionalnya. Peran aktif pemerintah desa dan pengelola TPST dalam melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelaraskan pemahaman masyarakat dengan kebutuhan sistem pengelolaan sampah. Meskipun masih ada tantangan seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang belum sepenuhnya hilang, tren positif dalam sikap masyarakat menunjukkan potensi keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah sambil tetap mendukung keberlanjutan operasional TPST.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan positif sebagian besar masyarakat 2) Resistensi parsial 3) Proses adaptasi bertahap 4) Kebutuhan strategi komunikasi komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Respon Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu harmonisasi kepentingan operasional dan partisipasi 	masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Kesuksesan dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemahaman dan komitmen pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi yang efektif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek disposisi di TPST Karangcegak memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah di desa, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi dapat menciptakan dampak positif yang signifikan.
16.	Berdasarkan jawaban dari kelima informan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem insentif yang diterapkan baik untuk pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah di Desa Karangcegak. Sistem insentif ini bervariasi dan mencakup berbagai bentuk. Untuk pelaksana kebijakan, khususnya pekerja TPST, insentif diberikan dalam bentuk bonus finansial yang terkait dengan pencapaian target pengolahan sampah. Hal ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Sementara itu, untuk masyarakat, insentif diberikan dalam beberapa bentuk, termasuk pengurangan biaya retribusi sampah bagi yang secara konsisten melakukan pemilahan sampah dengan baik, serta penghargaan berupa sertifikat dan voucher belanja. Program penghargaan tingkat RT/RW terbersih yang didukung dana desa juga menjadi bentuk insentif yang mendorong partisipasi kolektif masyarakat. Meskipun sistem insentif ini disambut positif dan dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi, ada pandangan bahwa kesadaran lingkungan seharusnya menjadi motivasi utama. Keberadaan sistem insentif ini menunjukkan upaya komprehensif dari pihak pengelola dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada reward jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Insentif beragam untuk pelaksana dan masyarakat 2) Motivasi finansial dan non-finansial 3) Mendorong partisipasi aktif 4) Membangun kesadaran jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Penghargaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada kesadaran berkelanjutan, bukan sekadar reward 	masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Kesuksesan dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemahaman dan komitmen pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi yang efektif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek disposisi di TPST Karangcegak memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah di desa, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi dapat menciptakan dampak positif yang signifikan.

d. Kesimpulan Umum Hasil Penelitian

	SubpAspek	Kesimpulan Umum Hasil Penelitian
Birokrasi	<p>Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek birokrasi, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara berbagai instansi terkait, serta mekanisme koordinasi yang berjalan cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian lebih, seperti peningkatan sosialisasi SOP dan peran instansi kepada masyarakat umum, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam proses koordinasi pengelolaan sampah. Selain itu, struktur organisasi yang fleksibel di TPST Karangcegak memungkinkan adaptasi cepat terhadap berbagai tantangan, yang didukung oleh kerjasama yang baik antara KSM Mekar Sari dan Pemerintah Desa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, program ini telah diimplementasikan dengan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan. Struktur birokrasi yang ada di TPST Karangcegak cukup terorganisir, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan pembagian tugas yang tegas antara instansi terkait. Mekanisme koordinasi yang baik antara KSM Mekar Sari dan Pemerintah Desa telah memungkinkan respons yang cepat terhadap berbagai tantangan operasional.</p> <p>Proses komunikasi dalam penyampaian kebijakan dari Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat desa berjalan cukup terstruktur, meskipun masih ada kesenjangan dalam penyebaran informasi di masyarakat yang perlu diperbaiki untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang merata.</p> <p>Sumber daya yang dimiliki oleh TPST Karangcegak, termasuk tenaga kerja, kompetensi, anggaran, dan peralatan, sudah cukup memadai untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan fasilitas dan pelatihan lanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas operasional di masa mendatang.</p> <p>Dari segi disposisi, para pelaksana menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap kebijakan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Etos kerja yang kuat dan sikap proaktif para pengelola telah berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.</p>
Komunikasi	<p>Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek komunikasi, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak telah berjalan dengan cukup terstruktur dan mencakup berbagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pelaksana dan masyarakat. Distribusi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa melalui sosialisasi, surat edaran, dan pertemuan koordinasi telah membantu dalam penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana di lapangan. Namun, ada variasi dalam kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat umum, dengan perbedaan yang terlihat antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi. Meskipun konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan berusaha dijaga, terdapat perbedaan dalam detail informasi yang diterima oleh berbagai pihak, yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi, terutama dalam menasar seluruh lapisan masyarakat, agar informasi kebijakan pengelolaan sampah dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan merata.</p>	
Sumberdaya	<p>Berdasarkan kesimpulan dari item-item pertanyaan pada aspek sumber daya, dapat disimpulkan bahwa TPST Karangcegak memiliki sumber daya manusia, kompetensi, anggaran, serta fasilitas dan peralatan yang cukup memadai untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Meskipun jumlah staf dianggap ideal dan kompetensi dasar mereka dinilai cukup, ada tantangan terkait keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengembangan lebih lanjut dan penambahan fasilitas yang diperlukan, seperti mesin pencacah sampah dan kendaraan pengangkut. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan lanjutan dan pengadaan peralatan baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas operasional di masa mendatang. Kendala dalam anggaran, meski cukup untuk operasional dasar, masih memerlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan TPST. Secara keseluruhan, meskipun TPST telah beroperasi dengan efisien dalam kondisi yang ada, diperlukan perhatian lebih pada pengembangan sumber daya untuk menghadapi tantangan di masa depan dan memastikan kinerja yang optimal.</p>	

	SubAspek	Kesimpulan Umum Hasil Penelitian
Disposisi	<p>Berdasarkan kesimpulan dari berbagai item pertanyaan pada aspek disposisi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak umumnya cukup baik, terutama di kalangan pengelola utama seperti Ketua KSM dan perangkat desa. Mereka telah memperoleh pemahaman yang memadai melalui sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait. Namun, tingkat pemahaman ini bervariasi di antara pelaksana, dengan pekerja lapangan yang lebih fokus pada aspek praktis daripada pemahaman mendalam tentang kebijakan. Selain itu, komitmen dan dedikasi pengelola TPST sangat tinggi, tercermin dari etos kerja yang kuat dan sikap proaktif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Para pengelola tidak hanya konsisten dalam memberikan layanan yang baik tetapi juga berusaha mencari solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran. Dedikasi ini telah meningkatkan kebersihan lingkungan dan menginspirasi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Kesuksesan dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemahaman dan komitmen pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi yang efektif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek disposisi di TPST Karangcegak memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah di desa, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi dapat menciptakan dampak positif yang signifikan.</p>	<p>Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak dapat dinilai cukup berhasil, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai optimalisasi kinerja di masa depan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan penanganan yang tepat terhadap tantangan yang ada, program ini memiliki potensi untuk menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa.</p>

Lampiran 5. Dokumen Penelitian

1. Data Dokumen Visual KSM Karangcegak

Data Pelanggan Sampah Hanggar Tpst 3r Mekarsari Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024

NO	Nama Pelanggan	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan		Jumlah
					(Rp)		
1	Karangcegak	Sumbang	150	KK	30.000	bulan	4.500.000
2	Tambaksogra	Sumbang	75	KK	30.000	bulan	2.250.000
3	Datar	Sumbang	175	KK	30.000	bulan	5.250.000
4	Kedungmalang	Sumbang	290	KK	30.000	bulan	8.700.000
5	Pasar Kedungmalang	Sumbang	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
6	Banjarkembar	PWT Utara	935	KK	30.000	bulan	28.050.000
7	Purwokerto Lor	PWT Utara	245	KK	30.000	bulan	7.350.000
8	Dukuhwaluh	Kembaran	160	KK	30.000	bulan	4.800.000
9	Perum Ledug Perwira	Kembaran	400	KK	30.000	bulan	12.000.000
10	Ledug Sejahtera	Kembaran	80	KK	30.000	bulan	2.400.000
11	Rumah Salit Elisabet	PWT Utara	1	unit	1.500.000	bulan	1.500.000
12	Hotel Wisata Niaga	PWT Utara	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
13	SMP Negeri 9	PWT Utara	1	unit	500.000	bulan	500.000
14	MAN 1	PWT Timur	1	unit	500.000	bulan	500.000
15	MAN2	PWT Timur	1	unit	500.000	bulan	500.000
16	MIN	PWT Timur	1	unit	350.000	bulan	350.000
17	Chery	PWT Timur	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
18	Ploris	PWT Timur	1	unit	1.500.000	bulan	1.500.000
19	Pasar Larangan	Kembaran	1	unit	2.000.000	bulan	2.000.000
			2.520				85.150.000

Kapasitas Pengolahan Sampah Hanggar Tpst 3r Mekarsari Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024

NO	PENGOLAHAN	KAPASITAS					
		PER HARI		PER BULAN		PER TAHUN	
1	Mesin 1	41	M3	1.230	m3	14.760	m3
2	Mesin 2	40	M3	1.200	m3	14.400	m3
3							
		81	M3	2.430	m3	29.160	m3

2. Dokumentasi Proses penelitian.



Lampiran 6. Proposal Penelitian

USULAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DESA KARANGCEGAK KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023**



Oleh :
SUNAR
20190210011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penerapan kebijakan dalam ranah nyata oleh berbagai pihak terkait. Proses ini melibatkan aktivitas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain yang ditunjuk dalam kebijakan tersebut (Okhtafianny & Ariani, 2023). Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua pihak utama yang berperan penting, yaitu implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah individu atau lembaga yang secara resmi diakui dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menjadi objek dari kebijakan yang diimplementasikan (Lestari & As'ari, 2022).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Namun dalam praktiknya, proses implementasi kebijakan seringkali sangat kompleks dan tidak jarang adanya intervensi dari berbagai kepentingan (Mansur, 2021). Implementasi juga merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan melalui proses interaksi antara tujuan kebijakan dan tindakan untuk mencapainya. Proses ini memerlukan jaringan pelaksana yang solid serta birokrasi yang efektif untuk dapat berjalan dengan baik (Wandani et al., 2023). Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi yang baik dari para pihak terkait, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, hingga masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan itu sendiri (Arief & Hayati, 2021).

Tantangan utama yang kerap muncul dalam implementasi kebijakan adalah perbedaan interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri di antara para

pihak terkait. Selain itu, kurangnya sumber daya seperti anggaran infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan (Daenie & Rizqi, 2021). Resistensi atau penolakan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang merasa kebijakan tersebut dapat merugikan kepentingan mereka juga kerap menjadi hambatan (Supriyanto & Priyanto, 2023). Terakhir, masalah kapasitas dan akuntabilitas pelaksana di tingkat bawah seperti rendahnya kompetensi, kurangnya pengawasan, dan masalah integritas juga dapat menjadi tantangan besar dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Zulfani & Warsono, 2022).

Implementasi kebijakan memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memerlukan proses implementasi agar dapat terwujud di lapangan. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi rencana yang tidak pernah terealisasi (Subianto, 2020). Dalam konteks pembangunan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat lokal sebagai sasaran dari program pembangunan itu sendiri. Keberhasilan implementasi akan menentukan sejauh mana tujuan pembangunan dapat dicapai, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelestarian lingkungan (Pramono, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, menjadi kunci untuk memastikan agar agenda pembangunan yang dicanangkan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur strategis dan wilayah dengan basis teknologi ramah lingkungan memiliki tujuan-tujuan mulia seperti mengurangi kesenjangan ekonomi, meminimalkan kerusakan lingkungan, menjamin ketahanan pangan, dan lainnya. Namun, sebagian besar tujuan tersebut masih belum tercapai secara optimal dan menghadapi

berbagai hambatan, sehingga pelaksanaannya belum berjalan efektif (Patiung, 2019). Salah satunya adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Sampah menjadi salah satu isu penting dalam masalah lingkungan khususnya perkotaan yang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat. Kesadaran masyarakat akan kebersihan ternyata masih sangat kurang. Permasalahan sampah di kawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, dan bangunan, serta kompleksitas problem transportasi. Semua parameter yang disebutkan saling berinteraksi, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang sangat signifikan. Hal inilah yang menjadikan sampah sebagai salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pelayanan publik, yaitu dengan menetapkan kebijakan terkait pengelolaannya. Meskipun demikian, adanya kebijakan tersebut belum menjamin pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik. Seringkali ditemukan instansi yang bertugas menangani masalah sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga menyebabkan pengelolaan menjadi tidak efektif dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti mencanangkan program 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), yang keberhasilannya bergantung pada partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 169 Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2023, permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. Total timbulan sampah dari jenis tersebut mencapai angka yang

cukup besar, yaitu 19.517.172,98 ton per tahun. Meskipun upaya pengurangan dan penanganan sampah telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal.

Dari total timbulan sampah tersebut, hanya sebesar 16,69% atau 3.258.383,14 ton per tahun yang berhasil dikurangi melalui berbagai program dan kegiatan. Sementara itu, persentase penanganan sampah yang berhasil dicapai adalah 50,12%, setara dengan 9.782.308,12 ton per tahun. Secara keseluruhan, jumlah sampah yang terkelola melalui pengurangan dan penanganan mencapai 66,82% atau 13.040.691,26 ton per tahun. Namun demikian, masih terdapat 33,18% atau 6.476.481,72 ton sampah per tahun yang tidak terkelola dengan baik. Angka ini menunjukkan bahwa sepertiga dari total timbulan sampah di wilayah tersebut masih belum dapat diatasi secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah di masa mendatang, agar permasalahan sampah dapat ditangani dengan lebih efektif dan menyeluruh.

Sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan sampah yang kompleks. Sebagai salah satu daerah berpenduduk besar di Jawa Tengah, Banyumas memproduksi sampah sebanyak 192.793 m³ per hari, menjadikannya kabupaten dengan tingkat produksi sampah terbesar ke-11 di provinsi tersebut. Namun, hanya 22,72% sampah yang terangkut, jauh di bawah rata-rata provinsi 26,94%. Dengan 1.679.124 jiwa penduduk pada 2018, Banyumas termasuk empat besar kabupaten/kota terpadat di Jawa Tengah. Timbunan sampah yang menumpuk menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Penanganan sampah yang belum memadai menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Banyumas. Dibutuhkan upaya dan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah persampahan guna menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. (jateng.bps.go.id 11/09/19).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sangatlah kompleks. Selain jumlah sampah yang besar dan pengangkutan yang belum

memadai, terdapat pula persoalan lain yang turut memperburuk kondisi. Sampah berserakan di pemukiman, gangguan transportasi akibat pengangkutan sampah, ketidaksesuaian tempat penampungan dengan volume sampah, serta pemisahan sampah yang belum bermanfaat merupakan kendala yang kerap ditemui. Lebih lanjut, kebiasaan membuang sampah ke sungai, kurangnya informasi tentang teknologi pengolahan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal turut menyumbang pada permasalahan persampahan di wilayah ini (Widiyanto et al., 2017). Dukungan masyarakat dan pemerintah yang belum maksimal, ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sampah, juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Banyumas.

Mengingat kompleksitas permasalahan persampahan yang dihadapi Kabupaten Banyumas, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi komponen krusial dalam menunjang sistem manajemen pengelolaan sampah (Tchobanoglous et al., 1993). Penyediaan TPA merupakan salah satu program nasional di setiap daerah sebagai konsep berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. TPA disediakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Damanhuri & Padmi, 2016). Keberadaan TPA yang bersih dan aman akan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh (Al-Khatib et al., 2010). Pengadaan TPA dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penimbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik (Guerrero et al., 2013). Namun, di sisi lain, kehadiran TPA seringkali menimbulkan dilema karena meskipun dibutuhkan, keberadaannya di ruang terbuka tidak diinginkan (Banar et al., 2009).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas semakin memuncak ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola Pemerintah Daerah ditutup oleh warga setempat. Penutupan TPA ini memaksa pemerintah mencari solusi alternatif untuk mengatasi penumpukan sampah di wilayah tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah membangun

pusat daur ulang sampah. Namun, upaya ini dinilai kurang maksimal dalam menangani permasalahan yang ada. Menghadapi kendala tersebut, pemerintah daerah kemudian berinisiatif membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dilengkapi mesin pemilah sampah organik dan anorganik. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi lebih efektif dalam mengelola sampah di Kabupaten Banyumas, setelah sebelumnya keberadaan TPA menimbulkan dilema karena ditolak warga meskipun dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif penimbunan sampah yang tidak tertangani (Banar et al., 2009; Guerrero et al., 2013).

Permasalahan penutupan TPA oleh warga dan kurang maksimalnya pusat daur ulang sampah awal menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mencari solusi terbaik pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Upaya ini pada akhirnya melahirkan berbagai terobosan baru dalam penanganan sampah di Kabupaten Banyumas. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang awalnya hanya berfungsi sebagai lokasi pengumpulan sampah sementara, kini telah diubah menjadi tempat pengolahan dengan fasilitas hanggar Pusat Daur Ulang (PDU). Lebih lanjut, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Pemerintah Banyumas membangun beberapa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem pengelolaan dengan pemilahan sampah bernilai ekonomis. Di TPST, sampah dipilah menjadi kategori plastik, kertas, organik, dan residu. Untuk mendukung operasional, pemerintah menyiapkan fasilitas seperti gedung/hanggar, alat transportasi, serta peralatan penting seperti ban berjalan, penghancur sampah organik, dan pengepres sampah plastik-kertas. Langkah inovatif ini diharapkan dapat membuat pengelolaan sampah di Banyumas menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang diolah secara terpadu.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur secara komprehensif sistem pengelolaan sampah, mulai dari

pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Salah satu fasilitas pengelolaan sampah yang diatur adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), yang berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengurangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi TPST yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta. Langkah inovatif tersebut selaras dengan upaya sebelumnya di mana TPS diubah fungsinya dengan fasilitas hanggar PDU, serta pembangunan TPST yang menerapkan pemilahan sampah bernilai ekonomis seperti plastik, kertas, organik dan residu dengan dukungan fasilitas memadai. Hadirnya regulasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang telah dikembangkan di Banyumas, setelah sebelumnya menghadapi kendala seperti penutupan TPA dan kurang maksimalnya pusat daur ulang sampah awal.

Pada awalnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mulai dikembangkan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Banyumas. Berbagai terobosan dan program yang dicanangkan Pemkab Banyumas, dapat menggapai target zero waste pada akhir 2022. Tercatat hingga akhir tahun 2022, setidaknya sudah ada 12 TPST yang berdiri di kabupaten ini dengan pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Tabel 1. Data TPST di Kabupaten Banyumas

No.	Nama	Alamat	Kapasitas Sampah
1.	KSM Mekarsasri	Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang	56 m ³ /hari
2.	KSM Randu Makmur	Desa Kedungradu, Kecamatan Patikraja	23 m ³ /hari
3.	KSM Wangon	Desa Banteran, Kecamatan Wangon	27 m ³ /hari
4.	KSM Ajibarang	Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang	25 m ³ /hari
5.	KSM Sumpiuh	Desa Kradenan, Kecamatan Sumpiuh	28 m ³ /hari
6.	KSM Cilongok	Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok	16 m ³ /hari
7.	KSM Pekuncen	Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen	18,5 m ³ /hari
8.	KSM Banyumas	Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas	18 m ³ /hari
9.	KSM Rawalo	Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo	22,8 m ³ /hari
10.	KSM Baturraden	Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden	25,5 m ³ /hari
11.	KSM Sokaraja	Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja	17,3 m ³ /hari

(Sumber: DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2022)

Tabel 1 menunjukkan data TPST di Kabupaten Banyumas beserta kapasitas sampah yang dapat ditangani per harinya. Berdasarkan data tersebut, KSM Mekarsari TPST Karangcegak di Kecamatan Sumbang adalah TPST yang memiliki kapasitas pengolahan terbesar, yakni 56 m³/hari. Meskipun demikian, pasokan sampah yang masuk ke TPST ini melebihi kapasitas sekitar 7 m³ dengan total 63 m³/hari. Keberadaan 12 TPST ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Banyumas setelah sebelumnya menghadapi kendala seperti penutupan TPA dan pusat daur ulang yang kurang maksimal. Didukung dengan payung hukum Peraturan Bupati No.24/2023, TPST yang dikelola KSM dengan pola kemitraan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menangani persoalan persampahan di wilayah tersebut secara terpadu.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebagai masyarakat, kita juga harus tertib dalam membuang sampah dan berkontribusi aktif dalam pengelolaannya. Dengan partisipasi warga secara luas, Indonesia dapat mempercepat pencapaian tujuan untuk bebas dari permasalahan sampah. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Banyumas.

Banyumas berhasil menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga hanya menyisakan 9% saja. Pencapaian luar biasa ini bahkan membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Banyumas sebagai contoh baik yang diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia dan mancanegara. Keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah menggunakan cara tersendiri dianggap menginspirasi dalam upaya mencapai target Indonesia Bebas Sampah pada 2040. Dengan pengelolaan sampah terpadu melalui 29 TPST dan campur

tangan semua pihak, Banyumas membuktikan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi jika ada komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Banyumas dalam mengatasi persoalan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Meskipun Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat produksi sampah terbesar di Jawa Tengah, namun berhasil mengelola sampah secara efektif sehingga menyandang predikat zero waste dan menjadi percontohan bagi daerah lain, bahkan dijadikan studi banding oleh negara lain. Urgensi penelitian ini didasari untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadikan Banyumas berhasil dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini akan melihat secara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Karangcegak. Pengelolaan sampah di Desa Karangcegak menjadi sorotan khusus karena KSM Mekarsari yang mengelola TPST di desa tersebut memiliki kapasitas pengolahan terbesar di Banyumas, bahkan melebihi kapasitas dengan pasokan sampah 63 m³/hari. Kabupaten Banyumas telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah, sehingga perlu dilihat secara spesifik bagaimana implementasinya di tingkat desa, terutama terkait faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan bagaimana dilihat dari aspek birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dengan meneliti secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, makayang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek

- a. Komunikasi
- b. Birokrasi
- c. Sumberdaya
- d. Disposisi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten dilihat dari aspek

- a. Komunikasi
- b. Birokrasi
- c. Sumberdaya
- d. Disposisi

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik dari aspek birokrasi, komunikasi, sumber daya, maupun disposisi.
- c. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama terkait upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, terutama di tingkat desa/kelurahan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis bagi optimalisasi kinerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Karangcegak.
- c. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah serupa, dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- d. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sampah yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain, terutama dalam hal kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta.

Demikian uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan pengelolaan sampah di

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkaya tinjauan pustaka dan mendukung penelitian ini, penting untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan dan referensi yang berharga terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, baik secara teoretis maupun praktis. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi celah atau gap yang perlu diisi melalui penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi bahan perbandingan dan evaluasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adnyana, Sulandari, dan Astawa (2023) membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah diimplementasikan oleh pemerintah desa, namun belum berjalan optimal. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada

implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang spesifik di Desa Penatih Daging Puri, Bali, dan fokus analisis terhadap Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019.

Penelitian Hastuti, Anwar, dan Darmi (2021) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor penghambat dalam kebijakan tersebut. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan sesuai standar, realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan isi kebijakan. Beberapa hambatan utama adalah kurangnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai dengan SOP. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain dalam mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah, namun berbeda dalam fokus pada hambatan implementasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Komarudin, Rosmajudi, dan Hilman (2023) melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan di Kecamatan Indihiang menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Persamaan dengan penelitian lain terletak pada fokus terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sementara perbedaannya adalah fokus spesifik pada pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tasikmalaya.

Penelitian oleh Abdussamad, Tui, Mohamad, dan Dunggio (2022) meneliti proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tersebut dilakukan dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program bank sampah berjalan dengan baik, efektivitasnya belum maksimal. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain dalam meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah, namun berbeda dalam fokus pada program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango.

Wachid dan Caesar (2020) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus belum diimplementasikan secara optimal, terutama karena kurangnya sosialisasi kebijakan dan keterbatasan anggaran serta peralatan pengolahan sampah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus lokasi di Kabupaten Kudus dan kendala yang diidentifikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Okhtafianny dan Ariani (2023) menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam

implementasi kebijakan ini adalah komunikasi yang tidak optimal dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sementara perbedaannya terletak pada fokus lokasi di Kota Payakumbuh dan analisis spesifik terhadap Perda No. 4 Tahun 2019.

Penelitian oleh Puspita, Rachmawati, dan Sampurna (2023) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi serta pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat, dengan koefisien determinasi sebesar 14.8%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus lokasi di Kota Sukabumi dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Suyeno, dan Putra (2023) membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2021 di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS), kondisi kendaraan pengangkut sampah yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 07

Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Silviana dan Kaukab (2021) mengkaji peran dan fungsi bank sampah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Jembangan, Kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bank sampah dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sampah berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat meskipun dalam skala kecil dan juga membantu menjaga kebersihan lingkungan. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis terhadap bank sampah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi di Desa Jembangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manalu, Tarigan, Girsang, dan Ginting (2022) bertujuan untuk mengevaluasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah ketiadaan peraturan daerah yang spesifik, kurangnya dukungan dari pimpinan, serta ketidakcukupan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks regulasi yang belum memadai di Kota Binjai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahupala (2020) mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, dengan studi kasus di Kecamatan Indihiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada

upaya komunikasi dan koordinasi, implementasi kebijakan belum optimal terutama karena keterbatasan anggaran. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis yang menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn di Kota Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Takaluhude, Gosal, dan Kasenda (2022) membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangbendar, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan ini serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teori implementasi dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum terlaksana secara optimal, dengan kendala utama berupa komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan anggaran, dan ketidakserasian antara pelaksanaan program di Dinas Lingkungan Hidup dengan pelaksanaan di Kelurahan. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi spesifik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penelitian yang dilakukan oleh Mokodompis, Kaunang, dan Kasenda (2019) bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih rendah, serta adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana seperti bank sampah dan TPS 3R, serta kurangnya penegakan hukum. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis terhadap peran masyarakat dan penegakan hukum di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Mulyadin, Ariawan, dan Subarudi (2022) menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan ini belum optimal, dengan kendala utama berupa anggaran yang belum digunakan secara efisien dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis spesifik terhadap kebijakan di DKI Jakarta dan hambatan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta.



Tabel 2.. Perbandingan *State of Art* dengan Penelitian yang akan dilaksanakan

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi (Persamaan dan Perbedaan)
1.	Laode Muhammad Kawa Tomi Diki dengan judul “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari”.	Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kendari.	Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada subjeknya penelitian terdahulu meneliti di Kecamatan Kendari Barat, sedangkan peneliti akan meneliti di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang
2.	Mohammad Daud Marasabessy dan Idris Rumodar dengan judul:	Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui	Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang terindikasi belum optimal Adalah aspek Sumberdaya yaitu	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama membahas tentang

	<p>“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)”</p>	<p>implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap kehidupan sosial masyarakat kota Ambon.</p>	<p>kualitatif.</p>	<p>sarana penunjang yaitu kendaraan. pengangkut sampah yang masih kurang memadai jika dibandingkan dengan besarnya volume. Sampah yang dihasilkan setiap hari. Implementasi kebijakan pengelolaan sampu pelaksanaan sudah baik, namun kurang</p>	<p>implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu dampak pengelolaan Sampah terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah TPST di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang</p>
3.					

B. Landasan Teori

1. Hubungan kajian ilmu administrasi Publik dengan Kajian Implementasi Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, dan gangguan estetika. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warganya. Menurut Denhardt & Denhardt (2003), administrasi publik harus fokus pada melayani kepentingan publik dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Pelayanan publik seperti pengelolaan sampah dianggap penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan berbagai undang-undang dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia, Pasal 5 ayat (1), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah. Ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah bagian dari tugas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang mendasar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif membantu mencegah penyebaran penyakit, mengurangi risiko bencana lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk ditinggali. Dengan demikian, pelayanan ini secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi warganya, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori *New Public Service* oleh Denhardt & Denhardt (2003; 2015)

Administrasi publik merupakan studi tentang proses kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama (2012: 19). Dalam konteks

pengelolaan sampah, ini berarti pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi setempat seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan (2012: 21).

Administrasi publik menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan mekanisme evaluasi yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi publik, kebijakan pengelolaan sampah dapat dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal. "Efisiensi merupakan kunci untuk mencapai administrasi publik yang bertanggung jawab dan efektif" (Rosenbloom et al., 2015: 92).

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif dalam administrasi publik. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan sampah meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Partisipasi warga dalam proses administrasi publik adalah elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis (Box, 2014: 173). Administrasi publik mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan legitimasi dan keberhasilan kebijakan. Partisipasi ini dapat berupa kontribusi ide, pengawasan, dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Administrasi publik sering kali melibatkan pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan kerangka regulasi yang jelas, peraturan yang mendukung, serta mekanisme untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum. Studi administrasi publik memberikan wawasan tentang

bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diterapkan secara efektif dengan melibatkan para pihak terkait (*stakeholders*) dalam proses pembuatan kebijakan (policy formulation) sejak awal (Bryson, 2004; S. P. Osborne, 2010). Regulasi yang baik, didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi (UNDP, 1997), membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Aspek manajemen dalam administrasi publik, termasuk manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan operasional, sangat relevan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep *New Public Management* yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan kinerja (Hood, 1991; D. Osborne & Gaebler, 1992). Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan pengorganisasian yang efektif dengan struktur organisasi yang adaptif (Farazmand, 2002), pengelolaan anggaran yang baik, dan pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan menggunakan indikator kinerja utama (key performance indicators) untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai (Poister, 2003). Manajemen yang baik juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kompetensi dan membangun organisasi belajar (*learning organization*) (Senge, 1990).

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Administrasi publik menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi antar lembaga ini melalui konsep *whole-of-government* (Christensen & Lægreid, 2007) dan *joined-up government* (Bogdanor, 2005), memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis menuju tujuan bersama. Koordinasi yang baik menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) dan *network governance* (Klijn & Koppenjan, 2016). Edward (dalam Kurhayadi, 2023) menekankan pentingnya empat faktor kritis dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas tentang tujuan dan sasaran kebijakan, serta koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana, sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun anggaran, juga menjadi prasyarat penting.

Selain itu, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan harus mendukung tujuan kebijakan itu sendiri. Administrasi publik mendorong pengembangan kebijakan yang inklusif, yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan perspektif masyarakat melalui pendekatan *deliberative policy analysis* (Hajer & Wagenaar, 2003) dan *public value governance* (Bryson et al., 2014). Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti kebijakan yang dirancang akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal dengan mengadopsi prinsip-prinsip desentralisasi dan subsidiaritas (Oates, 2003) (Oates, 1999). Kebijakan yang inklusif membantu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan melalui praktik *co-production* dan *co-creation* (Osborne et al., 2016).

Pendekatan administrasi publik menekankan pentingnya sustainabilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang baik harus berkelanjutan dalam jangka panjang dan akuntabel kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup pelaporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagai pelayanan publik, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pelaporan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sampah.

Secara garis besar kajian ilmu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Prinsip-prinsip administrasi

publik seperti efisiensi, efektivitas, kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas sangat penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Administrasi publik menekankan pentingnya regulasi yang jelas, manajemen yang baik, serta keterlibatan dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat, yang semuanya merupakan elemen kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tentang pengelolaan sampah akan sangat terbantu dan diperkaya dengan mengadopsi perspektif dan pendekatan dari kajian ilmu administrasi publik.

2. Kebijakan

Istilah "policy" dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "kebijakan" dalam Bahasa Indonesia. Namun, banyak orang masih sering menyamakan istilah kebijakan dengan kebijaksanaan. Sebenarnya, jika ditinjau dari segi tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom". Para peneliti berpendapat bahwa kebijakan dan kebijaksanaan adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada fakta bahwa kebijaksanaan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam, sementara kebijakan mencakup peraturan-peraturan dan sering kali terkait dengan konteks politik.

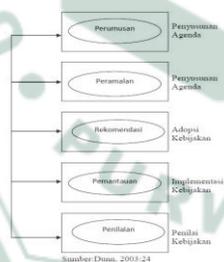
Istilah "kebijakan" sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering disamakan dengan "kebijaksanaan." Namun, sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Kebijaksanaan lebih menekankan pada pertimbangan dan kearifan individu yang berkaitan dengan aturan yang ada. Sebaliknya, kebijakan mencakup semua aturan, termasuk dalam konteks politik, karena proses pembuatan kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses politik. M. Irfan Islamy berpendapat bahwa:

“Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom”. (Islamy, 1997:5)

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, bukan sekadar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seharusnya mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang ingin dilakukan. Menurut Carl Friedrich, seperti yang dikutip oleh Wahab, kebijakan didefinisikan sebagai:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan adalah bagian dari aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian beberapa maksud atau tujuan tertentu. Walaupun maksud dan tujuan dari tindakan pemerintah tidak selalu mudah dilihat, ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang bertujuan tetap menjadi bagian penting dari definisi kebijakan. Tujuan ini umumnya ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn digambarkan sebagai berikut:



Melengkapi pendapat yang telah dikemukakan, Dunn menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Pembuatan Kebijakan

1. Perumusan masalah, yaitu kebijakan merumuskan masalah agar pemerintah mengetahui penyebab-penyebabnya, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang

peluang untuk mengatasi masalah melalui kebijakan baru.

- 2) Formulasi kebijakan: Pembuat kebijakan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
- 3) Adopsi kebijakan: Memilih alternatif kebijakan yang terbaik dalam mengatasi masalah.
- 4) Implementasi kebijakan: Tahap di mana kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) dengan memobilisasi sumber dana dan sumber daya lainnya.
- 5) Penilaian kebijakan: Proses evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam implementasinya di lapangan. Ini mencakup penilaian apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan di masyarakat dan mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003: 24).

Berdasarkan pendapat di atas, tahap-tahap tersebut dibuat agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, diharapkan kebijakan dapat diterapkan tanpa merugikan satu pihak atau menguntungkan pihak lain secara tidak adil. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan dirancang agar pemerintahan dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti menerapkan. Implementasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami perbedaan antara yang diharapkan dan fakta yang terjadi akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan suatu program. Subarsono mengatakan bahwa:

"Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)" (Subarsono, 2005:88).

Definisi di atas mengartikan bahwa implementasi adalah proses usaha

yang melibatkan upaya dari pembuat kebijakan untuk memberikan pelayanan yang baik. Pengertian ini menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditentukan melalui pelayanan. Menurut Kamus Webster, seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. (Webster dalam Wahab, 2004:64)

Menurut pendapat di atas, implementasi dapat pula diartikan sebagai proses pelayanan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan ini dilakukan dengan tujuan tertentu dan melibatkan tempat atau sarana yang digunakan dalam proses tersebut. Akibatnya, proses ini menghasilkan dampak tertentu dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Sedangkan implementasi menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2003:158) pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi, menurut Van Meter dan Vanhorn dijelaskan sebagai proses transformasi kebijakan dari konsep menjadi realitas yang terukur dan terimplementasi. Hal ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan secara efektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi sebelumnya bahwa:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Kebijakan ini adalah keputusan yang akan menghasilkan dampak setelah diterapkan. Saat membuat kebijakan, baik pemerintah maupun sektor swasta harus terlebih dahulu mengevaluasi apakah kebijakan tersebut akan berdampak buruk pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan mereka ketika diterapkan.

4. Implementasi Kebijakan

Meskipun kedua definisi di atas tampak berbeda, pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan prinsip. Proses yang dimaksud oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich sebenarnya merujuk pada penerapan ilmu dan seni seperti yang dimaksud oleh Manullang. Sementara itu, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan yang disebutkan oleh Gibson dan rekan-rekannya merupakan koordinasi dari berbagai aktivitas lainnya.

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah metode untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan mengacu pada aktivitas pelaksanaan kebijakan di dunia nyata, baik oleh aparat pemerintah maupun pihak-pihak lain yang ditentukan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dwiyanto Indiahono implementasi kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”. (Indiahono, 2009:143).

Menurut definisi ahli di atas, implementasi kebijakan adalah tahap

krusial dalam perumusan kebijakan yang berakhir pada keputusan yang memiliki dampak. Proses ini melibatkan penerapan nyata oleh pemerintah di lapangan untuk menghasilkan output dan outcomes, di mana output adalah hasil langsung dari kebijakan, sementara outcomes adalah dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Sementara itu, menurut Wahab, implementasi kebijakan adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi penyelesaian masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. (Wahab, 2001:42)

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan yang diatur oleh undang-undang sebagai perintah dari pemerintah, mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap masalah yang ada, dan merupakan keputusan yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan yang telah ditetapkan.

Adapun definisi implementasi dan kebijakan menurut Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen, the stages of policy making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it effects” (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan di atas, Edwards III mengidentifikasi empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu:

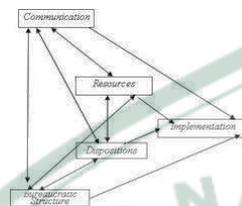
- 1) **Communication (komunikasi)**
- 2) **Resources (sumber daya)**

3) *Disposition* (disposisi/sikap)

4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)

(Edwards III, 1980:10-11).

Mengenai penjelasan dari Edwards III di atas, selanjutnya ia membuat model *Direct and Indirect Impact of Implementation*, yang dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2 Model Dampak
(sumber : George Edwards III, 1980:148)

Model pendekatan implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III adalah sebuah abstraksi atau performa dari suatu kebijakan, yang bertujuan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang optimal. Model ini beroperasi melalui hubungan antar berbagai variabel secara terus-menerus dan saling terkait. Menurut Edwards III, ada empat faktor atau variabel penentu yang mendukung proses implementasi kebijakan publik, yaitu:

Model pendekatan implementasi di atas, yang dikemukakan oleh George Edwards III merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel dan secara berkesinambungan atau berhubungan. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edwards III, ada empat faktor atau variabel penentu yaitu:

1) **Komunikasi**

Agar implementasi dapat berjalan efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas,

tegas, dan konsisten.

2) Sumber daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akuratnya perintah tersebut disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasi tidak akan efektif.

3) Kecenderungan (disposisi)

Disposisi atau sikap para implementor merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kita terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan suatu kebijakan telah tersedia dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat digagalkan karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi, meningkatnya ketersediaan data statistik meningkatkan peluang untuk data 'besar' dan analisis pembelajaran. Di sini, kami meninjau literatur akademis dan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan analisis data besar di sektor publik, dan kontribusinya terhadap kinerja dan efisiensi organisasi publik. Kami menguraikan keuntungan serta keterbatasan penggunaan big data dalam organisasi sektor publik dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian dalam penelitian terbaru dan area menarik untuk penelitian di masa depan.

Penjelasan mengenai teori yang dikemukakan oleh Edwards III adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi harus diikuti. Tentu saja, komunikasi ini harus akurat dan harus dipahami secara akurat oleh para pelaksana. Banyak kendala yang ada dalam jalur distribusi komunikasi implementasi." Meningkatnya ketersediaan data statistik meningkatkan peluang untuk data 'besar' dan analisis pembelajaran. Di sini, kami meninjau literatur akademis dan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan analisis data besar di sektor publik, dan kontribusinya terhadap kinerja dan efisiensi organisasi publik. Kami menguraikan keuntungan serta keterbatasan penggunaan big data dalam organisasi sektor publik dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian dalam penelitian terbaru dan area menarik untuk penelitian di masa depan.

2) Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akuratnya perintah tersebut disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang penting termasuk staf dengan jumlah yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan dan tentang kepatuhan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan; kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan fasilitas (termasuk gedung, peralatan, tanah dan perlengkapan) yang digunakan untuk menyediakan layanan. Sumber daya yang tidak memadai akan menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan, layanan tidak dapat diberikan, dan peraturan yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat dibuat.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap implementasi merupakan faktor kritis ketiga

dalam pendekatan kami terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Sebagian besar implementor dapat menggunakan keleluasaan yang cukup besar dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasannya adalah independensi mereka dari atasan nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas kebijakan itu sendiri. Namun demikian, cara para pelaksana menjalankan arahan mereka, sebagian besar bergantung pada disposisi mereka terhadap kebijakan, sikap mereka, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan yang mereka lihat dan bagaimana mereka melihat kebijakan tersebut mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

4) Struktur Birokrasi

Para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka mungkin masih terhambat dalam implementasinya oleh struktur organisasi tempat mereka bekerja, dua karakteristik birokrasi yang menonjol adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi, yang pertama berkembang sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya para pelaksana dan keinginan untuk menyeragamkan operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dan sering kali tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pelaksanaan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Pelaksanaan yang efektif terjadi ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Pemahaman ini dapat dicapai jika komunikasi berjalan dengan lancar, sehingga setiap keputusan dan aturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada personel yang tepat. Komunikasi dalam kebijakan memiliki beberapa dimensi, termasuk dimensi penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi

komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, dan sebaliknya.

Komunikasi adalah proses pengiriman pesan, informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi adalah elemen kunci untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif. Pelaksana kebijakan harus mengetahui tugas mereka dengan jelas. Keputusan dan perintah harus disampaikan dengan tepat sebelum bisa dilaksanakan. Menurut Edwards III, komunikasi memiliki tiga dimensi utama: distribusi (penyampaian informasi), kejelasan, dan konsistensi (Edwards III, 1980:10).

Menurut pendapatnya, komunikasi harus mencakup tiga elemen penting: distribusi (penyampaian informasi), kejelasan, dan konsistensi. Distribusi (penyampaian informasi) melibatkan penyampaian informasi kebijakan publik dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran atau masyarakat. Kesalahpahaman atau pengabaian keputusan sering terjadi, dan salah satu penyebabnya adalah penolakan pelaksana kebijakan untuk mematuhi perintah dalam implementasi, serta penggunaan diskresi yang tak terhindarkan dalam aturan umum.

Kejelasan (*clarity*) adalah faktor kedua dalam komunikasi, di mana tujuan yang telah ditentukan harus jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada selama pelaksanaan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan dengan jelas dan konsisten. Konsistensi (*consistency*) adalah faktor ketiga, di mana perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana untuk menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai pemahaman mereka sendiri.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik para pelaku kebijakan (implementor) memahami dan mampu melaksanakan tugas mereka, tetapi juga oleh sejauh mana mereka memiliki keinginan dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun ketentuan atau aturan kebijakan sudah jelas dan konsisten, tanpa

sumber daya yang memadai, implementor tidak dapat menjalankan kebijakan secara efektif. Menurut Edwards III, faktor-faktor sumber daya meliputi staf (aparatur), informasi, wewenang, dan fasilitas (Edwards III, 1980:10-11).

Berdasarkan pendapat Edwards di atas, sumber daya mencakup empat faktor: staf (aparatur), informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf (aparatur) adalah pelaku kebijakan yang memiliki kewenangan yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Informasi adalah data yang diolah menjadi pengetahuan atau keterangan yang berguna bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik untuk saat ini maupun masa mendatang, untuk melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan (*authority*) adalah otoritas formal yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Sementara itu, fasilitas (*facilities*) mencakup sumber daya peralatan pendukung yang diperlukan untuk menjalankan tugas operasional, seperti sarana dan prasarana, yang merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, disposisi merujuk pada sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, mereka akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Sikap pelaksana (*disposition*) merujuk pada kecenderungan, keinginan, atau kesediaan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan kebijakan tersebut. Menurut Edwards III, terdapat dua faktor dalam disposisi (sikap pelaksana), yaitu *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (insentif) (Edwards III, 1980:11).

Berdasarkan pendapat di atas, disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya

perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Elemen penting dalam disposisi termasuk tingkat kepatuhan pelaksana (*Effect of Disposition*) dan pemberian insentif (*Incentives*). Tingkat kepatuhan pelaksana (*Effect of Disposition*) mengacu pada kecenderungan pelaksana yang dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. Sementara itu, pemberian insentif (*Incentives*) adalah kecenderungan di mana pelaksana, melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan berupa keuntungan atau biaya, akan melaksanakan perintah dengan baik.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) adalah entitas yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Di dalam struktur birokrasi, terdapat dua elemen penting yang dapat mempengaruhi proses ini. Salah satunya adalah struktur birokrasi itu sendiri, di mana standar operasional prosedur (SOP) memainkan peran kunci. SOP berfungsi sebagai panduan bagi pelaksana kebijakan dalam tindakan atau tugas mereka. Faktor lain yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi. Edwards III mengemukakan bahwa ada dua elemen dalam struktur birokrasi, yakni Prosedur Operasional Standar (SOP) dan Fragmentasi (Edwards III, 1980:11-12).

Menurut pendapat tersebut, struktur birokrasi berperan sebagai sumber dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah tersedia dengan para pelaksana yang mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya serta memiliki motivasi untuk melaksanakannya. Namun, implementasi kebijakan masih belum efektif karena ketidakefisienan dari struktur birokrasi yang ada. Dua hal penting dalam struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentation* (fragmentasi). SOP adalah mekanisme, sistem, dan prosedur untuk melaksanakan kebijakan, serta pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab bagi

pelaksana kebijakan. Sementara itu, fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan di antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode dan beberapa alternatif solusi yang diformulasikan berdasarkan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan ini merupakan aturan yang dibuat pemerintah yang menghasilkan input dan output ketika diterapkan. Namun, dampak dari implementasi kebijakan tersebut bisa baik atau buruk tergantung pada pelaksanaannya, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut setelah implementasi dilakukan.

5. Tahapan Implementasi Kebijakan

Untuk menerapkan kebijakan secara efektif, diperlukan serangkaian tahapan implementasi. M. Irfan Islamy mengklasifikasikan tahapan implementasi kebijakan menjadi dua bentuk.

- a. Dikenal sebagai *self-executing*, artinya bahwa setelah dirumuskan dan disahkan, kebijakan akan terlaksana secara otomatis, seperti pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Dikenal sebagai *non self-executing*, artinya bahwa kebijakan publik harus diimplementasikan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai (Islamy, 1997:102-106).

Berdasarkan definisi tersebut, implementasi kebijakan mencakup dua konsep: *self-executing* yang berarti kebijakan akan diterapkan secara otomatis, seperti pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain, dan *non self-executing* yang memerlukan kontribusi dari berbagai pihak agar tujuan kebijakan tercapai. Sementara itu, menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1991, 36), terdapat beberapa tahap implementasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap I: Ini meliputi aktivitas-aktivitas berikut:

- a. Menyusun rencana program dengan menetapkan tujuan.

- b. Menetapkan standar pelaksanaan.
- c. Menetapkan anggaran dan jadwal pelaksanaan.

Tahap II: Ini adalah tahap pelaksanaan program dengan memanfaatkan struktur organisasi, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode yang tersedia.

Tahap III: Melibatkan aktivitas-aktivitas berikut:

- a. Menyusun jadwal.
- b. Melakukan pemantauan.
- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran program.

Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, tindakan yang sesuai harus segera diambil. Oleh karena itu, implementasi kebijakan selalu melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier seperti yang dijelaskan dalam Solichin Abdul Wahab (1991:38), studi mengenai implementasi kebijakan mencakup usaha untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program atau kebijakan diadopsi atau dirumuskan. Ini mencakup peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berkaitan dengan upaya administrasi maupun upaya untuk mencapai dampak tertentu pada masyarakat. Studi ini tidak hanya mempertimbangkan perilaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap target grup, tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan negara.

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pendapat tersebut, implementasi kebijakan merujuk pada kejadian atau kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara disahkan. Model kerangka analisis implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel utama:

- 1) Kendali terhadap kompleksitas masalah, yang mencakup indikator masalah seperti teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek yang terlibat, dan perubahan yang diharapkan.

- 2) Kemampuan kebijakan untuk merestrukturisasi proses implementasi, yang meliputi indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, penerapan teori kausal, alokasi sumber daya yang tepat, integrasi hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga tersebut, serta variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan sumber daya konstituen, dukungan dari pejabat tingkat atas, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Tahapan dalam proses implementasi, yang mencakup pemahaman oleh lembaga atau badan pelaksana terhadap kebijakan yang disusun, kepatuhan objek terhadap kebijakan tersebut, hasil yang dihasilkan, penerimaan hasil yang diperoleh, dan akhirnya, evaluasi dan revisi kebijakan yang dilaksanakan atau keseluruhan kebijakan yang bersangkutan (Mazmanian, Sabatier, 1983:20-39).

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, implementasi kebijakan dapat diperinci menjadi tiga variabel utama.

- 1) Metode penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan teori yang relevan untuk menangani masalah yang ada, sehingga dapat ditetapkan tujuan yang diharapkan.
- 2) Pentingnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut agar mencapai tujuan yang ditetapkan
- 3) Hasil yang terlihat setelah proses implementasi kebijakan berjalan, yang kemudian dapat dievaluasi untuk menilai pencapaian hasil tersebut.

7. Sampah

Sampah memiliki banyak definisi dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun pada dasarnya adalah bahan yang dibuang dari aktivitas manusia atau alam yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berbentuk padat, cair, atau gas dalam berbagai fase materi. Menurut Azwar (1990:53), sampah dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai, tidak disenangi, dan harus dibuang. Oleh karena itu, pengelolaan

sampah sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.

Kodoatie (2003:312) mendefinisikan sampah sebagai limbah padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, sampah (refuse) adalah benda atau hal yang dianggap tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup, karena dapat mengandung zat atau mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit dan bau yang tidak sedap jika terhirup.

Menurut Hadiwiyoto dalam Kuncoro (2009:14), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan tertentu, baik karena bagian utamanya telah diambil atau karena sudah tidak berguna lagi secara sosial-ekonomis, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap kelestarian.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bahan sisa berbentuk padat atau setengah padat dari bahan organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau proses alam, tidak memiliki nilai ekonomis, dan dapat menjadi sumber masalah kesehatan jika tidak dikelola dengan baik.

8. Jenis dan Sumber Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008, jenis dan sumber sampah yang dikelola terdiri dari:

- 1) Sampah rumah tangga: Sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga: Sampah yang berasal dari kawasan komersial, industri, khusus, sosial, umum, atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik, yang mencakup:

- a. Sampah yang mengandung bahan beracun.
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang belum dapat diolah secara teknologi.
- f. Sampah yang timbul secara tidak berkala.

Jenis sampah ini dikelola berdasarkan prinsip tanggung jawab dari penghasil sampah. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah dapat menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah secara efektif. Soedrajat (2006:45) menjelaskan konsep 3R sebagai berikut:

- 1) Reduce berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan meminimalkan penggunaan barang atau material.
- 2) Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang sehingga memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah.
- 3) Recycle berarti mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, dengan memanfaatkannya kembali menjadi barang lain.

Penerapan konsep 3R dalam pengelolaan sampah dianggap sebagai pendekatan efektif, terutama bagi masyarakat yang menjadi penghasil sampah paling produktif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sampah sering menghadapi hambatan utama, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kebiasaan membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu.

9. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas yang terkait dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer, pengelolaan, dan pemrosesan akhir atau pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan lingkungan, ekonomi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lain yang relevan dengan respons masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2010, pengelolaan sampah

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah mencakup:

- 1) Pemilahan sampah dengan pengelompokan dan pemisahan berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- 2) Pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
- 3) Pengangkutan sampah dari sumber atau tempat penampungan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- 4) Pengelolaan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- 5) Pemrosesan akhir sampah dengan aman mengembalikan residu hasil pengolahan ke lingkungan.

Undang-undang ini juga menetapkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di daerahnya. Tanggung jawab ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, serta menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah regional. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendorong pengembangan manfaat dari hasil pengolahan sampah, memfasilitasi teknologi lokal, dan melakukan koordinasi antar instansi terkait serta menyediakan unit layanan pengaduan masyarakat.

Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih baik, sehingga menghasilkan pengelolaan sampah yang

lebih efektif dan bermanfaat, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya produksi sampah di Kabupaten Banyumas dan keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, yang mendorong perlunya kajian implementasi di tingkat desa, khususnya di Desa Karangcegak. Fokus utama penelitian adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di TPST Karangcegak.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini, penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi meliputi distribusi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pesan. Sumber daya mencakup ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan informasi. Disposisi berkaitan dengan pemahaman pelaksana, komitmen, sikap masyarakat, dan insentif. Struktur birokrasi melibatkan SOP, pembagian tugas, dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian akan mengkaji proses implementasi di TPST Karangcegak, termasuk pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan anorganik, pemanfaatan ekonomis sampah, serta partisipasi masyarakat. Analisis juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, baik internal maupun eksternal.

Hasil implementasi akan dievaluasi berdasarkan efektivitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah ke TPA, serta manfaat ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan. Akhirnya, penelitian akan memberikan penilaian keberhasilan implementasi serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan

kebijakan serupa di daerah lain. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok (Cresswell, 2017). Dalam penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi mendalam tentang suatu kasus tertentu, mengumpulkan informasi lengkap melalui berbagai prosedur pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Kasus yang diteliti bisa berupa peristiwa, aktivitas, proses, atau program (Creswell, 2017).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Karangcegak, yang terletak di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan TPST Karangcegak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. TPST ini merupakan salah satu pioner dalam penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat desa di Kabupaten Banyumas, sehingga menjadi model yang menarik untuk dikaji implementasi kebijakannya. Sejak pendiriannya, TPST Karangcegak telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya, yang mencerminkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Lokasi ini menawarkan kesempatan untuk mengamati interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekar Sari, dalam upaya pengelolaan sampah. Keunikan karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Karangcegak juga memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lokal mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan memilih TPST Karangcegak sebagai lokasi penelitian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut.

C. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian merupakan subjek yang menjadi fokus dalam pengumpulan data dan informasi terkait fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Dalam konteks penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, sasaran penelitian mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses tersebut.

Creswell (2014) menekankan pentingnya memilih partisipan yang dapat memberikan pemahaman terbaik tentang masalah penelitian dan fenomena sentral dalam studi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian ini menetapkan sasaran utamanya pada pihak-pihak kunci dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak. Ini meliputi Pemerintah Desa Karangcegak sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal, pengelola TPST Karangcegak yang bertanggung jawab atas operasional harian, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas yang memiliki otoritas dalam perumusan dan pengawasan kebijakan di tingkat kabupaten.

Selain itu, mengacu pada konsep triangulasi sumber data yang dikemukakan oleh Patton (2015), penelitian ini juga menyertakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekar Sari dan masyarakat Desa Karangcegak yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah sebagai sasaran

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan komprehensif tentang implementasi kebijakan dari berbagai sudut pandang.

Yin (2018) menyarankan bahwa dalam studi kasus, peneliti perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, sasaran penelitian juga mencakup pihak-pihak lain yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, seperti mitra kerja dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah, atau lembaga swadaya masyarakat yang berkontribusi dalam program ini.

Dengan memilih sasaran penelitian yang beragam dan representatif, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang ditekankan oleh Denzin dan Lincoln (2018), yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

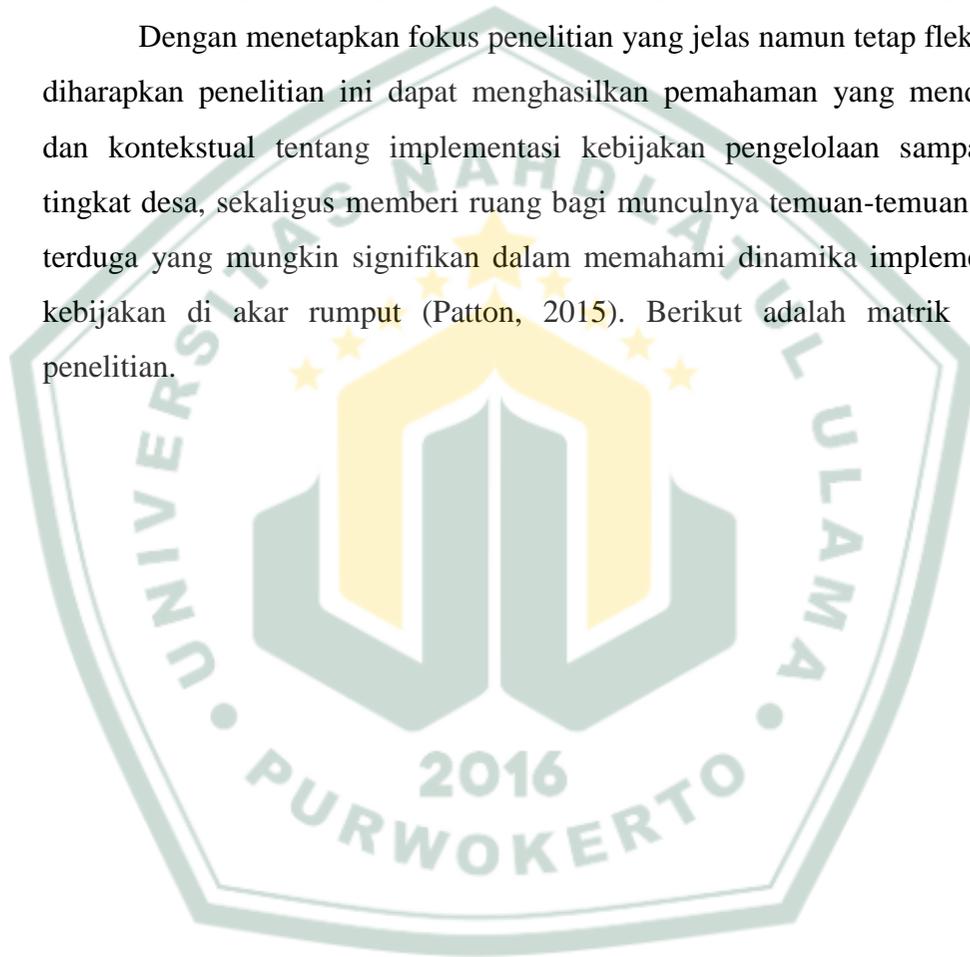
D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan aspek krusial dalam studi kualitatif, berfungsi sebagai batasan dan pengarah dalam proses penelitian (Moleong, 2018). Penetapan fokus yang jelas memungkinkan peneliti untuk membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu dikumpulkan dan mana yang dapat dikesampingkan (Yin, 2018). Dalam konteks penelitian implementasi kebijakan, fokus penelitian membantu mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dieksplorasi secara mendalam.

Creswell (2014) menekankan bahwa fokus penelitian dalam studi kualitatif seringkali berkembang selama proses penelitian, namun tetap penting untuk menetapkan arah awal yang jelas. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian ini menetapkan fokus awalnya pada empat dimensi utama implementasi kebijakan sebagaimana diidentifikasi oleh Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dalam konteks pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menyarankan bahwa fokus penelitian sebaiknya mencakup aspek-aspek yang memiliki potensi untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada interaksi antar pemangku kepentingan, tantangan dalam implementasi kebijakan, serta strategi adaptasi yang dikembangkan di tingkat lokal dalam mengelola TPST Karangcegak.

Dengan menetapkan fokus penelitian yang jelas namun tetap fleksibel, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, sekaligus memberi ruang bagi munculnya temuan-temuan tidak terduga yang mungkin signifikan dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di akar rumput (Patton, 2015). Berikut adalah matrik fokus penelitian.



Tabel3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Aspek Penelitian	Sub Aspek Penelitian	Item
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Birokrasi	Keberadaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di TPST Karangcegak	1
		Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi terkait (Pemerintah Desa, Pengelola TPST, KSM Mekar Sari)	2
		Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah	3
		Fleksibilitas struktur organisasi dalam menangani masalah pengelolaan sampah	4
	Komunikasi	Distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa	5
		Kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah kepada pelaksana dan masyarakat	6
		Konsistensi pesan kebijakan yang disampaikan kepada berbagai pihak	7
		Efektivitas sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Karangcegak	8
	Sumber daya	Kecukupan jumlah staf pengelola TPST Karangcegak	9
		Kompetensi dan keahlian staf dalam pengelolaan sampah	10
		Ketersediaan anggaran untuk operasional TPST	11
		Kelengkapan fasilitas dan peralatan di TPST (seperti alat pemilah sampah, kendaraan pengangkut)	12
	Disposisi	Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah	13
		Komitmen dan dedikasi pengelola TPST dalam menjalankan tugas	14
		Sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah	15
		Insentif bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif	16

E. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Creswell, 2014).

Patton (2015) menegaskan bahwa kekuatan purposive sampling terletak pada pemilihan kasus yang kaya informasi untuk studi mendalam. Dalam konteks penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, informan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, pemahaman mendalam tentang proses pengelolaan sampah, dan posisi strategis dalam struktur organisasi terkait.

Mengacu pada pendapat Morse (2010), jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara kaku, melainkan berdasarkan kejenuhan data. Namun, sebagai panduan awal, penelitian ini menargetkan informan kunci yang meliputi pejabat Pemerintah Desa Karangcegak, pengelola TPST, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, anggota KSM Mekar Sari, dan tokoh masyarakat yang aktif dalam program pengelolaan sampah.

Flick (2018) menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses pemilihan informan, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan dan memperluas sampel seiring berkembangnya pemahaman tentang kasus yang diteliti. Sejalan dengan ini, penelitian ini juga membuka kemungkinan untuk mengidentifikasi informan tambahan melalui teknik snowball sampling, di mana informan yang telah diwawancarai diminta untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan (Bernard, 2017).

Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, sekaligus memastikan

bahwa informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang paling relevan dan kredibel.

F. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dibagi atas:

- 1) Data Primer, merupakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama maupun informan pendukung.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh di luar dari data primer. Data sekunder merupakan data pendukung berupa arsip, buku, dokumen, profil atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Tabel 4. Matriks Sumber Data Penelitian

Tujuan Penelitian	Sumber Data	Subjek Penelitian
Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Data Primer : Data atau informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Kepala Desa, pengelola TPST, pengurus KSM Mekar Sari, serta masyarakat atau pihak yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak
	Data Sekunder: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Jurnal, buku, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dari tabel di atas dapat diketahui terkait dengan matriks sumber data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Adapun matriks sumber data digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membantu proses penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan aspek tujuan penelitian, kemudian diperkuat dengan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan

objek penelitian yang dihasilkan melalui wawancara dan diskusi secara langsung.

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berupa dokumen atau laporan yang memungkinkan sebagai pendukung dalam memperkuat laporan penelitian. Selain sumber data, dalam matriks tersebut juga menjelaskan subjek penelitian yang meliputi kepala desa, pengelola TPST, pengurus KSM Mekar Sari, serta masyarakat atau pihak yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak. Dengan menggunakan matriks sumber data tersebut diharapkan peneliti akan memperoleh data penelitian secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif (Creswell, 2014). Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, studi ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dari para informan kunci (Sugiyono, 2017). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan perspektif informan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik yang muncul selama percakapan (Moleong, 2018).

2) Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses implementasi kebijakan dan dinamika pengelolaan sampah di TPST Karangcegak (Creswell, 2014). Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan operasional dari fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017).

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah (Moleong, 2018). Dokumen yang dikaji meliputi peraturan daerah, laporan kinerja TPST, data statistik pengelolaan sampah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini membantu dalam memverifikasi dan memperkaya data yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Sugiyono, 2017).

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini sejalan dengan prinsip triangulasi yang dikemukakan oleh Moleong (2018), di mana penggunaan beragam metode dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian kualitatif. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan metode, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas (Sugiyono, 2017).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Moleong, 2018).

1) Reduksi Data

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan direduksi untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel, atau matriks yang menggambarkan berbagai aspek implementasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan upaya untuk mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi (Creswell, 2014). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017).

Selain itu, untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, akan digunakan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

I. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, keabsahan data akan diuji

menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, akan digunakan:

- a. Triangulasi Sumber: membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2018).
- b. *Member Check*: *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Creswell, 2014). Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dan observasi akan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi data.
- c. Kecukupan Referensial: Kecukupan referensial yaitu menggunakan bahan-bahan yang tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, akan dikumpulkan berbagai referensi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah untuk memperkaya analisis dan interpretasi data.
- d. Uraian Rinci: Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan (Creswell, 2014). Laporan hasil penelitian akan disusun secara detil dan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak.

Dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang kredibel, transferabel, dependabel, dan konfirmabel, sesuai dengan kriteria penelitian kualitatif .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Kebijakan Analisis Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Agranoff, R. (2012). *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.
- Bogdanor, V. (2005). *Joined-Up Government*. London: Oxford University Press.
- Box, R. C. (2014). Public Administration and Society. In *Public Administration and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781315701462>
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* ((4th ed.)). SAGE Publications, Inc.
- Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1969>
- Denhardt, J., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. M.E. Sharpe.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672. <https://doi.org/10.1111/puar.12347>
- Farazmand, A. (2002). *Modern organizations: Theory and practice*. Westport, CT: Praeger.
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (2003). *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society*. Cambridge University Press.
- Hastuti1, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Iqbal, M., Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & Subarudi, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129–140. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance networks in the public sector. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Third Edition*. London: Routledge. <https://doi.org/10.1081/e-epap3-120010870>
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3(4), 41–49.
- Kurhayadi. (2023). Public Policy Implementation: A Theoretical Review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 10–18.

- Lestari, N., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213)
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *AT-TAWASSUTH*, V(2), 324–334.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3.). Sage Publications.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance?: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance. In *Public Management Review*. Routledge.
- Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan SDGS Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.30742/jisa1912019686>

- Poister, T. H. (2003). *Measuring performance in public and nonprofit organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). Public Administration Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. In *McGraw-Hill Higher Education*. McGraw-Hill Education.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Saraswati, P. P., Suyeno, & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23205%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/23205/17407>
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Currency Doubleday.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Supriyanto, A., & Priyanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2023: Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik - 2)* /, 597–608.

- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. *Governance*, 2(2),1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42145/37303>
- Uke Ade Silviana, & Kaukab, M. E. (2021). Peran dan Fungsi Bank Sampah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Jembangan Kabupten Banjarnegara. *Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1).
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Governance Policy Paper.
- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>
- Wandani, T. A., Vestikowati, E., & Sunarti, N. (2023). Implementasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Mitra Hariwang Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Iliah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 628–645.
- Widiyanto, Fitria, A., Pratiwi, Catur, O., Yuniarno, & Saudin. (2017). Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*.
- Zulfani, S. I., & Warsono, W. (2022). Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10, 32–48. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/41678><https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/download/41678/36341>

Internet

SIPSN. (2024). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah: Atasai Sampah Dengan Cara Produktif. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 10/01/2024.pukul 10.45 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/3397248/dirjen-pslb3-banyumas-jadi-percontohan-dalam-pengelolaan-sampah#:~:text=Dia%20mengatakan%20atas,masyarakat%2C%20lingkungan%2C%22%20ujarnya>.

Letter of Acceptance (LoA)

Nomor: 6/LoA/PPMI/Admin/I/2024

Dengan hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam Jurnal Public Policy and Management Inquiry (PPMI) (p-ISSN: 2716-313X; e-ISSN: 2714-626X), dengan rincian artikel sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Penulis : Sunar, Chamid Sutikno, Indah Ayu Permana Pribadi, Zaula Rizqi Atika
Email Korespondensi : sunar.unupwt@gmail.com

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, dengan ini kami sampaikan bahwa artikel Anda telah **DITERIMA** untuk diterbitkan dalam Jurnal Public Policy and Management Inquiry (PPMI) Volume 8, Nomor 2, November 2024. Anda dapat mengakses edisi tersebut melalui tautan berikut setelah tersedia:

<https://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/issue/view/819>

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Shadu Satwika Wijaya, S.Sos., M.Si
Managing Editor

Jurnal Public Policy and Management Inquiry (PPMI)
ISSN : 2716-313X (Print), 2714-626X (Online)

Web: <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/index>

Email: shadu.satwika@unsoed.ac.id